



LAPORAN INDEKS P4GN

Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika

2024





LAPORAN

PENGUKURAN INDEKS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)

TAHUN 2024

**Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional**

Jakarta, November 2024

Kelompok Kerja Pengukuran Indeks P4GN Tahun 2024

Pengarah:

Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si. (Kepala BNN)

Penanggung jawab:

Augustinus B. Pangaribuan, S.I.K., M.Si. (Kapuslitdatin BNN)

Konsultan:

Prof. dr. Budi Utomo, M.P.H., Ph.D.

Ketua:

Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si.

Peneliti:

1. Purwa Kurnia Suahya, S.K.M., M.Si.
2. Hendri Hartati, S.K.M., M.Kes, M.P.H.
3. Agus Dwi Setiawan, S.Sos., M.Kes.
4. Luluk Ishardini, S.K.M., M.P.H.
5. Mona Lisa, S.K.M., M.K.M.

Anggota:

1. Aris Sujarwati, S.H., M.Si.
2. Rotua Sihotang, S.Th., M.Si.
3. Sri Lestari, S.Kom., M.Si.
4. Imam Tri Cahyadi, S.Kom.
5. Siti Nurlela M, S.P., S.H., M.Si.
6. Sri Haryanti, S.Sos., M.Si.
7. Novita Sari, S.Sos., M.H.
8. Bastara, S.E.
9. Armita Eki Indahsari, S.Si.
10. Radityo Kunto Harimurti, S.Stat.
11. Agung Prabowo, S.T.
12. Jarot Apriyanto, A.Md.
13. Adi Wirawan, A.Md.
14. Rizky Purnamasari, S.Psi.
15. Chipta Adhitya Rahman

Pendahuluan

Latar belakang. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN merupakan program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sebagai upaya peningkatan akuntabilitas publik, keberhasilan program ini tidak hanya diukur melalui prevalensi penyalahgunaan narkoba, yang hanya menggambarkan dampak jangka panjang, tetapi juga memerlukan indikator jangka pendek yang mencerminkan efektivitas intervensi program secara rutin. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan Indeks P4GN sejak 2020 sebagai alat ukur alternatif yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas program di setiap level administrasi, termasuk tingkat pusat dan daerah.

Upaya pengembangan Indeks P4GN ini melibatkan kerja sama dengan institusi akademik, serta penyesuaian metodologi dan indikator sesuai kebutuhan program. Hasil indeks awal menunjukkan bahwa beberapa provinsi menunjukkan efektivitas program yang cukup baik, sementara sebagian lainnya masih memerlukan peningkatan. Penelitian terbaru pada 2024 akan memperbaiki komponen pengukuran untuk meningkatkan akurasi dan relevansi dengan tujuan strategis BNN.

Tujuan dan Manfaat. Adapun tujuan utama dari penelitian ini meliputi penyusunan perhitungan indeks komposit P4GN, penentuan nilai indeks kinerja dari seluruh kedeputian BNN, serta identifikasi tantangan dan strategi perbaikan program. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendukung evaluasi program P4GN secara lebih efektif, sebagai bahan perbaikan kebijakan dan dokumentasi kinerja dalam rangka pencapaian target Rencana Strategis BNN 2020-2024.

Kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian mencakup konsep pengukuran Indeks P4GN, dengan gambaran model awal yang kompleks, kemudian disederhanakan melalui pendekatan sistem (input, proses, dan output/outcome) untuk memudahkan pemahaman. Konsep indeks P4GN yang digunakan mempertimbangkan landasan regulasi seperti Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN 2020-2024. Angka indeks P4GN yang dievaluasi mencakup ukuran tidak langsung kinerja dan efektivitas program P4GN, evaluasi dan akuntabilitas P4GN, pengukuran berdasarkan data yang relevan dan akurat pada struktur, proses, capaian, dan dampak program, mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Metode Penelitian

Desain Penelitian. Pengukuran Indeks P4GN menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei mandiri *online* yang disebar ke seluruh tingkatan BNN, dari pusat hingga kabupaten/kota. Survei ini berlangsung selama empat minggu (Juli–Agustus 2024) dengan instrumen berdasarkan program yang tercantum dalam Rencana Strategis BNN 2020–2024 dan kegiatan tahun 2023. Data tambahan diperoleh dari Sistem Informasi Narkotika (SIN). Data kualitatif diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan daring pada September 2024, untuk menggali tantangan implementasi program di tiap kedeputian BNN.

Sumber Data. Data diperoleh dari seluruh unit kerja teknis BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

Konsep Penghitungan Indeks P4GN. Indeks P4GN dihitung berdasarkan tiga aspek: input, proses, dan output/outcome. Penghitungan dilakukan dengan rumus yang mempertimbangkan bobot 20% untuk input, 30% untuk proses, dan 50% untuk output/outcome. Indeks dihitung dengan mengumpulkan data survei dan data SIN, lalu mengolahnya menjadi persentase untuk setiap dimensi.

Cara Penghitungan Indeks P4GN. Penghitungan indeks dilakukan berdasarkan nilai survei dengan berbagai tipe pertanyaan, seperti skala *Likert* dan pertanyaan ya/tidak, yang dipetakan ke dalam dimensi input, proses, dan output/outcome. Nilai SIN distandarisasi dalam bentuk persentase agar seragam dan dihitung ulang untuk tiap kabupaten/kota.

Tahapan Kegiatan. Tahapan dimulai dengan menyamakan pemahaman tim P4GN tentang konsep indeks, menyusun instrumen survei, pengumpulan data online, dan analisis data SIN. Data kemudian diolah, dianalisis, dan diverifikasi melalui FGD, dilanjutkan dengan penyusunan laporan akhir.

Analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel, mencakup tabulasi silang antar dimensi indeks dan tingkat instansi. Hasilnya menampilkan distribusi angka indeks P4GN secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Keterbatasan. Keterbatasan mencakup kualitas data SIN, keterbatasan pengetahuan pengisi data di lapangan, dan isu kelengkapan isian data. Hasil penelitian menggambarkan pencapaian antar daerah dan menjadi dasar peningkatan program P4GN.

Struktur dan Tugas Pokok & Fungsi BNN

BAB ini membahas struktur organisasi dan tugas pokok Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, BNN memiliki tugas utama untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN; mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; berkoordinasi dengan pihak terkait; peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkotika; memberdayakan masyarakat; memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat; serta melakukan kerja sama regional dan internasional dalam upaya P4GN. Selain itu, BNN juga bertugas mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika dan melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terkait kasus narkotika.

Struktur BNN meliputi Kepala BNN, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, lima deputy, dan beberapa pusat serta beberapa unit kerja vertikal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tersebar hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Setiap deputi memiliki fungsi spesifik: Deputi Bidang Pencegahan fokus pada kegiatan informasi, edukasi, dan advokasi; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjalankan pemberdayaan masyarakat; Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mendukung aspek hukum, regulasi dan kerja sama P4GN; Deputi Bidang Pemberantasan fokus pada operasi penegakan hukum; dan Deputi Bidang Rehabilitasi memastikan akses serta kualitas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna.

Struktur organisasi BNN memiliki karakteristik tersentralisasi dengan pelibatan BNN di tingkat daerah, yang memungkinkan respons yang lebih efektif terhadap kondisi lokal. Keterlibatan multi-sektor dalam program seperti “Desa Bersih Narkoba” (Desa Bersinar) menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional, dimana program P4GN dilaksanakan satu lokus pada target desa

Melalui Deputi Bidang Rehabilitasi, BNN berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi berbasis institusi dan masyarakat, serta mendorong program intervensi melalui agen pemulihan di tingkat desa. Kolaborasi dengan berbagai instansi dalam negeri dan internasional memperkuat upaya BNN dalam P4GN. Deputi Bidang Pemberantasan bekerja dengan lembaga penegak hukum untuk mengatasi jaringan narkoba, sementara Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mendukung legalitas program melalui bantuan hukum, regulasi dan kerja sama.

Angka Indeks P4GN BNN.

Bab 4 dalam dokumen ini membahas data Indeks P4GN yang disusun oleh BNN untuk periode 2021 hingga 2024. Indeks ini diukur pada berbagai tingkatan kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan nasional, untuk mencerminkan efektivitas program P4GN di seluruh Indonesia.

Angka Indeks P4GN Nasional. Menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, terutama pada tingkat pusat mengalami kenaikan signifikan dari 55 pada tahun 2021 menjadi 81 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pusat dalam penanganan narkoba. Pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga terjadi peningkatan, meskipun dengan variasi laju. Tingkat kabupaten/kota meningkat dari 52 pada tahun 2021 menjadi 64 pada tahun 2024, dan tingkat provinsi meningkat dari 56 pada tahun 2021 menjadi 70 pada tahun 2024.

Analisis Kedeputian menunjukkan bahwa pusat memiliki kinerja terbaik, dengan kontribusi signifikan dari Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencatat nilai indeks tinggi di semua tingkatan. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama hanya diukur pada tingkat pusat.

Indeks Berdasarkan Pulau mencatat Jawa dan Kalimantan sebagai wilayah dengan indeks tertinggi di berbagai aspek P4GN, sementara Maluku berada pada nilai terendah. Faktor infrastruktur dan alokasi sumber daya dianggap mempengaruhi capaian ini.

Indeks P4GN Nasional menggunakan pendekatan Input-Proses-Output/Outcome (IPO). Pendekatan ini mencakup tiga komponen:

1. Input: Nilai input sebesar 64,8 mencerminkan ketersediaan sumber daya yang telah efektif, meskipun masih ada kekurangan. Di seluruh kedeputian terdapat keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur yang memerlukan kolaborasi lintas instansi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program P4GN.

2. Proses: Indikator proses memperoleh nilai tertinggi (66,8), menunjukkan pelaksanaan program efektif. Inisiatif termasuk kolaborasi dengan lembaga lain, peningkatan kurikulum pendidikan, pengembangan konten edukatif, dan monitoring dengan sistem informasi. Namun, keterbatasan kapasitas dan fluktuasi anggaran di beberapa kedeputian masih menjadi hambatan.

3. Output/Outcome: Nilai output/outcome (64,2) merupakan nilai yang terendah dibanding input dan proses, hal ini menunjukkan capaian akhir yang kurang optimal. Meski target program tercapai dalam banyak aspek, evaluasi menyeluruh masih diperlukan untuk menilai efektivitas dampak dan kolaborasi.

Secara keseluruhan, data indeks P4GN mencerminkan upaya yang positif namun bervariasi dalam pelaksanaan program P4GN di seluruh Indonesia. Hasil analisis ini menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal serta penyesuaian strategi intervensi berdasarkan kebutuhan regional. Dengan rata-rata indeks sebesar 65,1 mengindikasikan performa relatif seimbang, tetapi peningkatan lebih lanjut pada tahap input dan output/outcome diperlukan untuk mencapai target program yang lebih tinggi. Keselarasan dalam implementasi strategi diharapkan dapat mengoptimalkan konversi input ke output/outcome yang lebih efektif.

Angka Indeks P4GN Daerah

Bab ini membahas hasil pencapaian program P4GN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indeks yang disusun melalui analisis sistemik (input, proses, output/outcome). Hasil ini diharapkan menjadi evaluasi bagi setiap daerah untuk meningkatkan program P4GN di masa depan.

Tingkat Provinsi. Sebanyak 66% provinsi masuk dalam kategori "Efektif" dan 18% "Sangat Efektif," yang menunjukkan keberhasilan relatif di tingkat provinsi. Namun terdapat 10% provinsi termasuk dalam kategori "Cukup Efektif" dan 6% "Kurang Efektif," yang memerlukan perhatian khusus.

Tingkat Provinsi Menurut Kedeputian. Bidang Rehabilitasi memiliki indeks tertinggi (74,9), diikuti Bidang Pemberdayaan Masyarakat (73,6), menunjukkan pencapaian yang baik terhadap pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Indeks Bidang Pemberantasan (66,9) dan Bidang Pencegahan (65,4) lebih rendah, sehingga membutuhkan perbaikan di masa mendatang .

Distribusi Provinsi. Sebagian besar provinsi memiliki indeks dalam rentang 60-70, dengan D.I. Yogyakarta sebagai provinsi dengan indeks tertinggi (71,0). Sedangkan provinsi dengan indeks terendah yaitu Kepulauan Riau (56,1).

Analisis Input-Proses-Output/Outcome. Provinsi dengan keseimbangan dalam alokasi input, proses, dan output/outcome cenderung memiliki hasil yang lebih

baik. Beberapa provinsi dengan ketidakseimbangan menunjukkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan program dan memerlukan perbaikan khusus di aspek tertentu.

Tingkat Kabupaten/Kota. Sebanyak 66% kabupaten/kota memiliki nilai indeks dalam kategori "Efektif," sedangkan 16% "Cukup Efektif" dan 14% "Kurang Efektif." Hanya 4% yang memiliki nilai indeks "Sangat Efektif." Evaluasi lanjutan diperlukan untuk memahami kendala pada daerah dengan efektivitas rendah dan meninjau keberhasilan di daerah dengan efektivitas tinggi.

Indeks terendah dan tertinggi di kab/kota. Data mengenai Indeks P4GN di tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2024 menunjukkan variasi kinerja antara BNN Kabupaten dan BNN Kota di berbagai wilayah Indonesia. Nilai indeks terendah tercatat di BNN Kab. Sanggau (44,5) dan tertinggi di BNN Kota Banjar Baru (81,1), dengan rata-rata indeks BNN Kab/Kota 64,0. Variasi ini mencerminkan perbedaan capaian kinerja di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain sumber daya, dukungan masyarakat, dan kesiapan daerah dalam menjalankan program P4GN.

Tingkat Kab/kota Menurut Kedeputian. Data lebih lanjut menunjukkan performa BNN di empat bidang utama: Pemberantasan, Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan, dan Rehabilitasi. Bidang pemberantasan tercatat memiliki nilai indeks terendah yaitu 53,1, yang mencerminkan tantangan cukup tinggi dalam penegakan hukum. Sebaliknya, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan memperoleh indeks tinggi (70,3 dan 63,7), menunjukkan keberhasilan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bidang rehabilitasi juga menunjukkan kinerja baik (69,1), meskipun masih ada tantangan dalam akses dan kualitas layanan.

Tingkat Pulau Menurut Kedeputian. Analisis berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa kinerja terbaik tercatat di Jawa, sementara wilayah seperti Maluku dan Papua menunjukkan kinerja yang lebih rendah, terutama dalam bidang pemberantasan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat dan pencegahan berjalan cukup baik, namun pemberantasan narkoba membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitasnya.

Terakhir, analisis berdasarkan Input-Proses-Output/Outcome (IPO) menunjukkan capaian terendah adalah dimensi output/outcome pada bidang pemberantasan yaitu 49,6%, dan capaian tertinggi adalah dimensi output/outcome pada bidang rehabilitasi yaitu 75,7%.

Tantangan & Strategi

Tantangan. Badan Narkotika Nasional (BNN) menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi program P4GN di tingkat kabupaten/kota. Kendala utama meliputi kurangnya komitmen dari pemerintah daerah, yang sering kali tidak menjadikan masalah narkoba sebagai prioritas, serta terbatasnya regulasi daerah yang mendukung upaya P4GN. Selain itu, kerja sama lintas sektor, khususnya dengan sektor swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), masih kurang optimal. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan

sarana prasarana, terutama pada Bidang Pemberantasan dan Rehabilitasi, serta masalah administrasi dalam pelaporan dan pencatatan data.

Strategi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain: (1) Penguatan komitmen pemerintah daerah dengan sosialisasi dan pendekatan regulasi yang mewajibkan dukungan P4GN; (2) Optimalisasi kerja sama lintas sektor dengan meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR; (3) Penguatan SDM dan infrastruktur dengan perekrutan tenaga tambahan dan pelatihan lintas bidang; (4) Peningkatan sistem pelaporan dan pencatatan dengan standarisasi pelatihan dan integrasi sistem data; (5) Optimalisasi anggaran untuk meningkatkan efektivitas program pemberantasan dan rehabilitasi.

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan angka indeks P4GN menunjukkan tren positif antara tahun 2021 hingga 2024, terutama di tingkat pusat dan nasional. Peningkatan indeks di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menandakan adanya perbaikan kinerja meskipun tantangan masih ada, seperti kurangnya komitmen pemerintah daerah dan keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi diusulkan, termasuk penguatan komitmen pemerintah daerah, optimalisasi kerja sama lintas sektor, penguatan SDM dan infrastruktur, serta peningkatan sistem pelaporan.

Saran. Sebagai upaya lebih lanjut, saran yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas dan sumber daya, penguatan kolaborasi lintas sektor melalui forum dan pemanfaatan dana CSR, serta optimalisasi infrastruktur rehabilitasi, terutama di daerah dengan indeks rendah. Selain itu, disarankan untuk dilakukan penguatan regulasi, mengembangkan sistem informasi terintegrasi, melakukan analisis berbasis data, dan meningkatkan penyuluhan serta keterlibatan masyarakat dalam program P4GN. Fokus perlu diberikan pada pemberantasan narkoba dengan memperkuat kolaborasi dengan penegak hukum dan memperkuat pemanfaatan teknologi dalam operasi pemberantasan. Terakhir, penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dilakukan secara berkala sebagai bahan masukan kebijakan dan strategi ke depan.

Kata Pengantar

Pengukuran Indeks P4GN ini disusun sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja P4GN, yang menjadi salah satu sasaran strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk periode 2020–2024. Pengembangan Indeks P4GN telah dimulai sejak tahun 2022 melalui serangkaian tahapan, yang mencakup pengembangan konsep, perumusan definisi variabel, serta penentuan indikator pembentuk indeks. Seluruh proses ini melibatkan pengumpulan data secara berkala, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) bersama unit-unit kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi (BNNP), dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK), serta pemanfaatan data dari Sistem Informasi Narkoba BNN.

Pada tahun 2024, pengukuran ini kembali dilanjutkan dengan fokus pada penyempurnaan komponen penyusun indeks. Proses ini didukung oleh masukan dari BNNP dan BNNK di seluruh Indonesia melalui pengisian angket daring serta diskusi kelompok terarah secara virtual.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pengukuran Indeks P4GN tahun ini. Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam evaluasi serta penyempurnaan program dan kebijakan P4GN di masa mendatang.

Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Bapak Augustinus B. Pangaribuan, S.I.K., M.Si., Prof. dr. Budi Utomo, M.P.H., Ph.D. dan Purwa Kurnia Suahya, S.K.M., M.Si., atas dukungan penuh yang diberikan. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh anggota Kelompok Kerja. Tak lupa, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada tim peneliti, yaitu: Agus Dwi Setiawan, S.Sos., M.Kes., Hendri Hartati, M.Kes., M.P.H., Luluk Ishardini, S.K.M., M.P.H., Mona Lisa, S.K.M., M.Kes.

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung upaya pemberantasan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dengan keberhasilan yang terukur, semoga penelitian ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Ketua Kelompok Kerja

Ringkasan Eksekutif	4
Kata Pengantar	10
Daftar Isi	11
Daftar Tabel	13
Daftar Gambar	14
BAB 1 PENDAHULUAN	15
1.1 Latar belakang	15
1.2 Tujuan	16
1.3 Manfaat	17
1.4 Kerangka Konsep	18
BAB 2 METODE	22
2.1. Desain	22
2.2. Sumber Data	23
2.3. Konsep Perhitungan Indeks P4GN	23
2.4. Cara Penghitungan Angka Indeks P4GN	23
2.5. Tahapan Kegiatan	27
2.6. Analisis	28
2.7. Keterbatasan	28
BAB 3 STRUKTUR DAN TUGAS POKOK & FUNGSI BNN	33
3.1 Tugas Utama dan Fungsi	33
3.2 Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN)	36
3.3. Karakteristik Utama Susunan Organisasi BNN	37
3.4 Kedeputan Bidang Pencegahan	38
3.5 Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38
3.6 Kedeputan Bidang Hukum dan Kerja Sama	39
3.7 Kedeputan Bidang Pemberantasan	41
3.8 Kedeputan Bidang Rehabilitasi	41
BAB 4 ANGKA INDEKS P4GN BNN	43
4.1 Angka Indeks P4GN Nasional	43
4.2. Angka Indeks P4GN Kedeputan	45
4.3 Angka Indeks P4GN Menurut Wilayah Regional	47
4.4 Angka Indeks P4GN Menurut Kedeputan dan Wilayah Regional	49
4.5. Angka Indeks P4GN Nasional Menurut Input-Proses-Output/Outcome (IPO)	51

BAB 5. ANGKA INDEKS P4GN DAERAH.....	58
5.1 Kategori Angka Indeks P4GN Tingkat Provinsi.....	58
5.2 Angka Indeks P4GN Provinsi Menurut Kedepatian	59
5.3 Angka Indeks P4GN Tingkat Provinsi.....	61
5.4 Angka Indeks P4GN Tingkat Provinsi Menurut Input-Proses-Output/Outcome	63
5.5 Kategori Angka Indeks P4GN Tingkat Kabupaten/ Kota	65
5.6 Angka Indeks P4GN Terendah dan Tertinggi di Tingkat Kabupaten/ Kota	67
5.7 Angka Indeks P4GN Kabupaten/ Kota Menurut Kedepatian	68
5.8 Angka Indeks P4GN Kabupaten/ Kota Menurut Kedepatian & Pulau.....	70
5.9 Angka Indeks P4GN Kabupaten/ Kota Berdasarkan Input-Proses-Output/Outcome (IPO).....	72
BAB 6 TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI P4GN	75
6.1 Tantangan	75
6.2 Strategi	76
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
7.1 Kesimpulan.....	78
Daftar Pustaka	81
LAMPIRAN.....	82

Daftar Tabel

Tabel 1. Jenis pertanyaan, nilai nilai, dan perhitungan penyusun angka indeks	24
Tabel 2. Klasifikasi, Batasan Indeks, dan Pengertian Klasifikasi dari Indeks P4GN	27

Daftar Gambar

Gambar 1. Konsep Indeks P4GN awal	18
Gambar 2. Konsep Indeks P4GN revisi	19
Gambar 3. Kerangka Kerja Logis Renstra BNN 2020-2024	21
Gambar 4. Tren Angka Indeks P4GN menurut Jenjang, 2021-2024	43
Gambar 5. Tren Angka Indeks P4GN menurut Kedeputian & Jenjang, 2021-2024	45
Gambar 6. Angka Indeks P4GN menurut Pulau, 2024	48
Gambar 7. Angka Indeks P4GN menurut Pulau & Kedeputian, 2024	49
Gambar 8. Angka Indeks P4GN Nasional menurut Input-Proses-Output, 2024	52
Gambar 12. Angka Indeks P4GN Provinsi menurut Input-Proses-Output/Outcome, 2024 ...	63
Gambar 13. Kategori Indeks P4GN Tingkat Kab/Kota, 2024.....	65
Gambar 14. Angka Indeks P4GN 5 Terendah & 5 Tertinggi di Kabupaten/Kota, 2024.....	67
Gambar 15. Angka Indeks P4GN di Kabupaten/Kota Berdasarkan Kedeputian, 2024.....	68
Gambar 16. Angka Indeks P4GN menurut Pulau & Kedeputian di Kabupaten/Kota, 2024...	70
Gambar 17. Angka Indeks P4GN di Kab/Kota menurut Kedeputian & IPO, 2024.....	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, program untuk penanganan masalah narkoba disebut dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Sebagai program prioritas pembangunan manusia, keberhasilan program P4GN harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja program P4GN memerlukan adanya indikator sebagai ukuran capaian intervensi program untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Selama ini keberhasilan program P4GN hanya diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba masih terbatas menggambarkan kondisi keterpaparan penyalahgunaan narkoba pada kelompok masyarakat umum dalam kurun waktu tertentu. Potret yang diberikan terkait dengan angka prevalensi adalah gambaran dampak program P4GN yang baru dapat terukur dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Sementara pengukuran keberhasilan program atau kebijakan bukan hanya membutuhkan indikator yang bersifat jangka panjang, tetapi juga membutuhkan indikator yang dapat diukur perubahannya setiap tahun dan dilakukan secara rutin. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tidak memberikan gambaran atau mengidentifikasi faktor dan hubungan atau pengaruh secara langsung dari berbagai intervensi program P4GN terhadap perubahan suatu kondisi secara langsung. Untuk itu, BNN perlu membangun alternatif pengukuran keberhasilan P4GN selain dari angka prevalensi. Pengukuran ini menggunakan instrumen pengukuran kinerja program P4GN berdasarkan landasan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat memotret, meninjau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program P4GN secara tepat. Alternatif pengukuran yang telah dilakukan di tahun 2020-2023 adalah pengukuran Indeks P4GN. Kemudian pada tahun 2024 ini sesuai arahan kebijakan nasional dan kebijakan BNN maka dilakukan pengukuran indeks P4GN kembali dengan menggunakan basis data kinerja BNN dan satker dari pusat hingga daerah tahun 2023.

Pelaksanaan pengukuran indeks P4GN ini telah digagas oleh BNN yang merupakan *leading sector* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sejak tahun 2020. Dalam kegiatan pertama di tahun 2020, BNN bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Penelitian di tahun 2020 menghasilkan angka indeks P4GN nasional yaitu 53,1 artinya masuk ke dalam kategori cukup efektif. Hasil perhitungan indeks P4GN di tingkat provinsi menghasilkan 55,9 dari total provinsi masuk kategori cukup efektif dan sebanyak 44,1 provinsi sisanya masuk kategori kurang efektif. Sayangnya hasil penelitian tersebut belum bisa secara langsung mengukur kepada indeks kinerja program di tingkat ke deputian. Padahal informasi tersebut diperlukan untuk bisa menjawab intervensi apa yang harus dilakukan di masing-masing ke deputian.

Kemudian mulai dari tahun 2021-2023 dilakukan penghitungan kembali indeks P4GN oleh BNN bersama tim konsultan dan peneliti Universitas Indonesia (UI) agar dapat memenuhi kebutuhan dari tiap ke deputian. Laporan tersebut dibuat dengan menggunakan data survei dan data pendukung yang diperoleh dari Sistem Informasi Narkoba (SIN) milik BNN. Dengan berbagai pendekatan dan juga modifikasi metode perhitungan yang dilakukan sebelumnya disesuaikan dengan konteks program. Indeks P4GN menggambarkan kinerja program untuk merefleksikan hasil kerja dari tiap ke deputian di BNN yang secara langsung memberikan layanan pada masyarakat serta Bidang/Unit yang memberikan dukungan/menunjang kegiatan peningkatan Kapasitas dan operasional internal rutin di BNN.

Peningkatan dan penyempurnaan terus dilakukan pada pengukuran indeks P4GN sejak 2021 hingga saat ini, dan hasil telah disosialisasikan ke semua Satker di lingkungan BNN. Dari hasil sosialisasi telah didiskusikan kembali tentang konsep, definisi variabel dan indikator pembentuk Indeks P4GN dari pengumpulan data rutin di seluruh bidang tugas di BNN. Kemudian mengingat indeks P4GN bersifat dinamis maka diperlukan pengukuran kembali pada tahun 2024 yang dilakukan untuk menyempurnakan komponen penyusun indeks P4GN pada tahun sebelumnya.

1.2 Tujuan

Tujuan pengukuran Indeks P4GN adalah:

- a. Menyusun rumusan perhitungan indeks komposit P4GN yang mencakup aspek input, proses, output/outcome
- b. Mengetahui nilai indeks P4GN BNN dari semua kedeputian mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota di tahun 2024
- c. Mengidentifikasi tantangan dan strategi program P4GN untuk perbaikan program P4GN ke depan.

1.3 Manfaat

- a. Memberikan kontribusi dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan program P4GN di Indonesia.
- b. Memberikan masukan untuk bahan evaluasi guna perbaikan atau penyempurnaan kebijakan program dan kegiatan P4GN menjadi lebih efektif dan efisien.
- c. Memperoleh dokumentasi hasil penilaian kinerja P4GN dari tiap Kedeputian di BNN dan Indeks P4GN secara keseluruhan
- d. Bentuk perwujudan target Rencana Strategis BNN 2020-2024 yang telah ditetapkan BNN pada Peraturan Kepala BNN No.6 Tahun 2020.

1.4 Kerangka Konsep

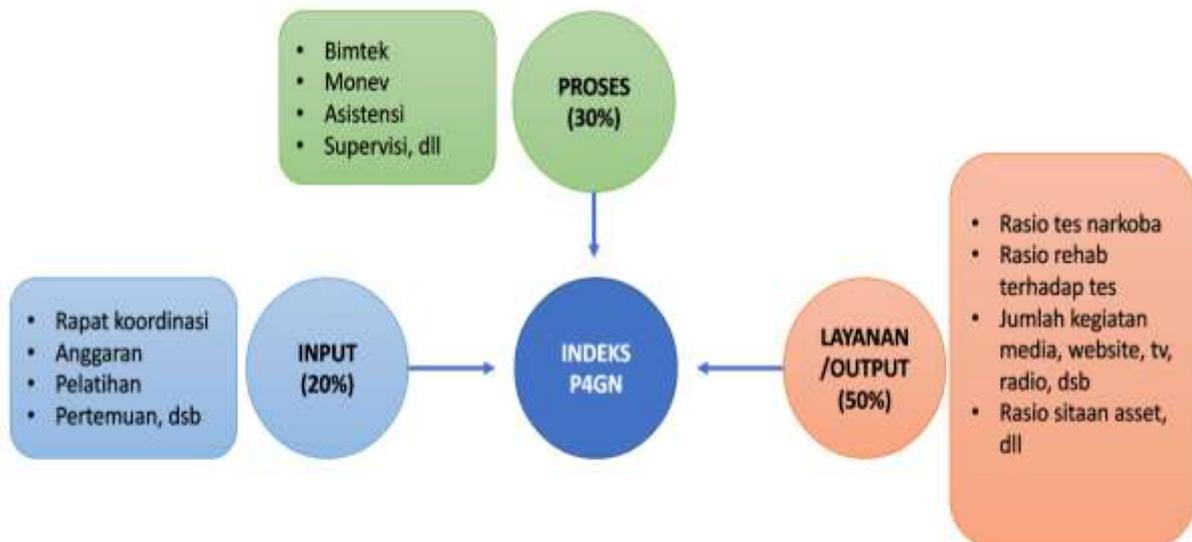
Indeks P4GN merupakan salah satu Sasaran Strategis BNN dalam Meningkatkan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang tercantum Rencana Strategis BNN 2020-2024. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Untuk itu, ide konsep awal P4GN yang diajukan seperti yang tertera pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Konsep Indeks P4GN awal



Melihat model diatas, isu masalah P4GN memang sangat kompleks. Dari kerangka diatas, selanjutnya model tersebut lebih disederhanakan dan direduksi agar lebih mudah dipahami, melalui pendekatan sistem, yaitu input (I), proses, dan output/outcome (O). Untuk itu, kami mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai program/kegiatan dari dokumen yang ada dalam kategori atau dimensi input, proses, ataupun output/outcome. Sebagai acuan dokumen untuk pemetaan program/kegiatan adalah rencana strategis BNN tahun 2020-2024 dan dokumen perencanaan anggaran BNN tahun 2023. Pada akhirnya, konsep indeks P4GN yang digunakan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 2. Konsep Indeks P4GN revisi



Angka indeks P4GN yang dimaksud dalam pengukuran ini merupakan suatu ukuran atau nilai yang digunakan untuk menilai secara tidak langsung kinerja dan efektivitas program P4GN. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan akuntabilitas, yang dirancang untuk memberikan gambaran holistik mengenai pelaksanaan dan dampak program P4GN di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga tingkat kabupaten/kota.

Pengukuran indeks dilakukan secara objektif berdasarkan kerangka evaluasi yang melibatkan tiga dimensi utama, yaitu struktur, proses, capaian, dan dampak program. Dimensi input mengacu pada kesiapan organisasi dan kebijakan yang mendukung implementasi P4GN, sedangkan dimensi proses menilai pelaksanaan program, termasuk efektivitas alur kerja dan efisiensi sumber daya. Pada sisi lain, dimensi capaian (*output*) dan dampak (*outcome*) digunakan untuk menilai hasil konkret dan perubahan yang dihasilkan dari program tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam konteks ini, indeks kinerja lebih berfokus pada pengukuran dimensi struktur, proses, dan layanan yang tersedia, sedangkan indeks efektivitas difokuskan pada dimensi capaian dan dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program P4GN tidak hanya dinilai dari segi pelaksanaan administratif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perubahan nyata dalam masyarakat.

Perhitungan indeks dilakukan pada tiga tingkatan, yakni nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tingginya akurasi dan relevansi perhitungan indeks sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data yang memadai di setiap tingkatan tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan dan validasi data menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini sekaligus menjadi tantangan utama dalam mengukur indeks P4GN, mengingat perbedaan kondisi sumber daya dan kapasitas antar wilayah.

Dengan pendekatan berbasis data yang komprehensif ini, angka indeks P4GN diharapkan dapat menjadi alat strategis yang memberikan informasi yang mendalam, mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program P4GN secara keseluruhan.

Gambar 3. Kerangka Kerja Logis Renstra BNN 2020-2024

Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba					Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas	
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba					Indeks Pelayanan Publik	
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba					Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi	
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)					Indeks Reformasi Birokrasi	
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

BAB 2

METODE

2.1. Desain

Pengukuran Indeks P4GN ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pengisian data secara mandiri menggunakan instrumen survei terstruktur yang disebarakan secara online melalui Google Form. Survei ini dilaksanakan selama empat minggu pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Pengisian angket survei ditujukan kepada seluruh tingkatan BNN, mencakup BNN pusat, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota. Di tingkat pusat, survei melibatkan berbagai bidang/kedeputian, yaitu Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Rehabilitasi, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama sedangkan tingkat daerah unit-unit terkait baik di tingkat provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota.

Instrumen survei ini dirancang berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis BNN 2020–2024, serta program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kedeputian di BNN pada tahun 2023. Penyusunan instrumen survei dilakukan bersama perwakilan setiap kedeputian, satuan kerja, dan unit pendukung dalam lingkungan BNN. Indikator input, proses, dan output/outcome dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diidentifikasi dengan cermat. Selain data angket, data dari Sistem Informasi Narkotika (SIN) turut dimanfaatkan dalam pengukuran ini. SIN merupakan kumpulan data rutin yang dikumpulkan BNN dari laporan hasil kegiatan seluruh unit BNN, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota. Tantangan utama dalam pemanfaatan data SIN adalah isu kualitas data, terutama terkait ketidakseragaman satuan data. Sebagai langkah mitigasi, dilakukan seleksi data yang relevan dengan pengukuran, khususnya untuk indikator yang mengukur proses dan output.

Pendekatan kualitatif diterapkan melalui kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan perwakilan BNN pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Diskusi ini dilaksanakan di tiap kedeputian secara online selama dua hari pada bulan September 2024. FGD ini terbagi dalam lima tema diskusi dengan tujuan menggali dan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi program kegiatan kedeputian. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

mendalam kepada tim kelompok kerja terkait fenomena yang ditemukan dari hasil pengukuran kuantitatif.

2.2. Sumber Data

Data pengukuran indeks P4GN diperoleh dari satuan kerja operasional di lingkungan BNN. Pengumpulan data dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2024, data yang dikumpulkan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

2.3. Konsep Perhitungan Indeks P4GN

Penghitungan indeks P4GN dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu:

- Sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan kegiatan/program P4GN (*Input*), seperti SDM, realisasi anggaran, tupoksi & struktur, sarana & prasarana, pelatihan dan SOP
- Kegiatan atau aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan P4GN (*proses*), seperti: Jenis kegiatan, perencanaan, dan monev
- Hasil kegiatan atau program P4GN yang telah dilaksanakan (*output/outcome*), seperti hasil capaian dan penilaian atas hasil capaian

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks P4GN} = w_1 \text{ Indeks Input} + w_2 \text{ Indeks Proses} + w_3 \text{ Indeks Output/Outcome}$$

w menunjukkan nilai bobot di tiap dimensi pengukuran.

$$w_1 = 20\%; w_2 = 30\%; w_3 = 50\%;$$

2.4. Cara Penghitungan Angka Indeks P4GN

Setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan pengukuran dan pengolahan data. Cara penghitungan indeks P4GN sebagai berikut:

- a. Menghitung nilai atau score hasil angket. Setiap pertanyaan dalam angket memiliki nilai/nilai. Cara perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Identifikasi setiap pertanyaan dengan melihat pilihan jawaban. Setiap pertanyaan memiliki nilai/nilaie maksimal 2. Misalkan untuk pertanyaan berbentuk skala likert nilai nilai maksimal adalah 2 karena ada dua kategori jawaban yang nilainya dianggap sama seperti “sangat berhasil” dan “berhasil” diberi nilai 2, untuk yang menjawab “sedang” dan “kurang” diberi nilai 1, sedangkan “tidak tahu” diberi nilai 0 (nol). Demikian pula untuk pertanyaan yang berbentuk ya/tidak nilai maksimalnya 2 (jawab “Ya”), atau 1 untuk “Tidak”. Detail nilai nilai tiap jenis pertanyaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jenis pertanyaan, nilai nilai, dan perhitungan angka indeks

Kedeputian	Jenis pertanyaan	Nilai/Nilai	Perhitungan
Bagian Umum/ settama/inspektorat, dkk	Skala likert	Sangat berhasil (>85%) = 2 Berhasil (71%-85%) = 2 Sedang (50%-70%) = 1 Kurang Berhasil (<50%) = 1 Tidak Tahu = 0	Jumlah nilai dibagi total maksimal nilai * 100% Hasil perhitungan: Input * bobot (20) Proses * bobot (30) output * bobot (50)
Pemberdayaan Masyarakat/ Pencegahan/ Pemberantasan/ Rehabilitasi/ Hukum dan Kerja Sama	Pertanyaan Ya/Tidak	Ya = 2; Tidak = 1	Jumlah nilai dibagi total maksimal nilai * 100% Hasil perhitungan:
	Jumlah unit kerja / peralatan, dsb	0 = 0 1-3 = 1 >3 =2	Input * bobot (20) Proses * bobot (30) output * bobot (50)
	Jawaban persentase	>70% = 2 50%-70% = 1 <50% = 0	

- 2) Selanjutnya, setiap pertanyaan dikelompokkan ke bagian input, proses, atau output/outcome. Kemudian dihitung seluruh pertanyaan, mulai dari jenis pertanyaan dan nilai nilai maksimalnya. Nilai nilai maksimal digunakan sebagai angka denominator di tiap kelompok pertanyaan.
- 3) Hitung nilai disetiap kelompok pertanyaan dalam satuan persen (100%). Misalkan, % pelatihan = rerata persentase dari variable pengukuran pelatihan.

Ilustrasinya, misalkan ada 5 pertanyaan skala likert, maka total maksimal nilai/nilaie 10 (denominator). Jika dari 5 pertanyaan total nilai ada 8 (numerator), maka nilainya adalah $8/10 \times 100 = 80\%$.

- b. Menghitung nilai/nilai data dari sistem informasi narkoba (SIN). Satuan nilai atau angka dari SIN bervariasi, misalkan jumlah orang, jumlah kegiatan, berat (gram, kilo gram, paket, dsb), nilai rupiah, dsb. Untuk itu, perlu dilakukan standarisasi nilai dalam satuan persentase (%). Caranya:
- 1) Dari setiap variabel kegiatan, dicari nilai/angka maksimalnya di tiap jenjang (provinsi atau kabupaten). Angka ini sebagai denominator dari setiap kab/kota. Misalkan, dari 167 kab/kota untuk variabel kegiatan tangkapan kasus tertinggi adalah 310 orang di kota Jakarta Utara. Ini yang akan menjadi denominator di tiap kab/kota lainnya.
 - 2) Hitung angka persentase (100) di tiap kab/kota. Misalkan, di kabupaten Cianjur jumlah tangkapan kasus ada 50 orang, maka nilainya adalah $50/310 \times 100\% = 16,1\%$.
 - 3) Identifikasi setiap variable kegiatan ke dalam kategori input, proses, atau output/outcome.
- c. Penggabungan hasil perhitungan dari poin 1 dan poin 2 di atas. Dari setiap kelompok pertanyaan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu input, proses, dan output/outcome. Kemudian dihitung nilai nilai Kembali dengan rumus sebagai berikut:

Rumus persentase indeks per dimensi (input/proses/output/outcome):

$$\% \text{ Indeks per dimensi} = \left(\frac{\% \text{ kegiatan 1} + \% \text{ kegiatan 2} + \% \text{ kegiatan 3} + \dots}{N \text{ (jumlah aktivitas)}} \right) 100\%$$

Catatan: % kegiatan = nilai dari setiap pengelompokan kegiatan pada setiap dimensi

N = jumlah kegiatan

Misalkan untuk persentase kegiatan:

Penyusun dimensi input adalah: % SDM + % realisasi anggaran + % tupoksi & struktur + % sarana & prasarana+ % pelatihan + % SOP, dimana:

- % SDM = rerata persentase dari variable pengukuran SDM
- % realisasi anggaran = rerata persentase dari variabel realisasi anggaran menurut informan BNN, BNNP, dan BNNK
- % tupoksi dan struktur = rerata persentase dari variabel pengukuran tupoksi dan struktur
- % sarana & prasarana = rerata persentase dari variabel pengukuran sarana & prasarana
- % pelatihan = rerata persentase dari variabel pengukuran pelatihan
- % SOP = rerata persentase dari variabel pengukuran SOP

Penyusun dimensi proses adalah: % Jenis kegiatan + % perencanaan + % monev, dimana:

- % Jenis Kegiatan= rerata persentase dari variabel pengukuran Jenis kegiatan
- % Pencapaian = rerata persentase dari variabel pencapaian kegiatan
- % Monev = rerata persentase dari variabel pengukuran Monev

Penyusun dimensi output/outcome adalah: % hasil capaian + % penilaian atas hasil capaian, dimana:

- % Hasil capaian = rerata persentase dari variabel pengukuran hasil capaian
- % Penilaian atas hasil capaian = rerata persentase dari variabel Penilaian atas hasil capaian

d. Memberikan nilai bobot dari tiap dimensi, dengan rumus:

$$\text{Indeks P4GN} = \text{Indeks Input (20\%)} + \text{Indeks Proses (30\%)} + \text{Indeks Output/Outcome (30\%)}$$

e. Hasil angka indeks P4GN selanjutnya, dilakukan klasifikasi atau pengkategorian untuk memudahkan dalam memantau perkembangan tiap kab/kota atau provinsi. Klasifikasi dibagi ke dalam 4 kategori seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi, Batasan Indeks, dan Pengertian Klasifikasi dari Indeks P4GN

Klasifikasi	Batasan ukuran indeks	Pengertian klasifikasi
Sangat Efektif	Nilai indeks lebih dari 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai maksimal
Efektif	Nilai indeks antara 60 – 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai ideal
Cukup Efektif	Nilai indeks antara 50 – 60	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai standar minimal
Kurang Efektif	Nilai indeks kurang dari 50	Hasil capaian kinerja tidak mencapai nilai standar

2.5. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) tahapan, yaitu:

1. Membangun persamaan persepsi seluruh tim kelompok kerja indeks P4GN untuk menyepakati kerangka konsep dan metodologi penyusunan indeks P4GN.
2. Melakukan review dan menyepakati indikator yang dijadikan acuan untuk penyusunan kuesioner atau angket untuk pengukuran indeks P4GN. Referensi utama adalah program/kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023.
3. Melakukan penyusunan instrumen *online* dan panduan pengisian instrumen.
4. Melakukan pengumpulan data secara *online* dengan menyebarkan instrumen ke seluruh satuan kerja operasional di lingkungan BNN. Pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan.
5. Melakukan review dan analisis data sekunder dari sistem informasi nasional (SIN) BNN.
6. Melakukan pengolahan dan analisis data.
7. Melakukan klarifikasi dan validasi data dari hasil perhitungan angka indeks P4GN melalui FGD atau *workshop* yang melibatkan peserta dari BNN pusat, provinsi, dan kab/kota.
8. Melakukan Penyusunan laporan akhir.

2.6. Analisis

Pengumpulan data survei *online* menggunakan *software google form*, hasil data tersebut berbentuk *file Microsoft Excel* untuk memudahkan pengolahan dan analisis data. Analisis data yang dilakukan berupa distribusi frekuensi dan tabulasi silang antar variabel.

Analisis dilakukan dengan pendekatan keseluruhan (sistem) yang terdiri dari dimensi input, proses, output/outcome. Analisis yang dilakukan lebih kepada statistik deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran dan distribusi hasil angka indeks P4GN di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Hasil angka indeks P4GN dilakukan tabulasi silang antar penyusun dimensi indeks, tingkatan (pusat, provinsi, kab/kota), klasifikasi indeks (sangat efektif, efektif, cukup efektif, dan kurang efektif), ke deputian (pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, hukum dan kerja sama), dan sebagainya.

2.7. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

- Hasil isian survei *online* ada beberapa daerah yang isinya tidak sesuai dengan pertanyaannya. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petugas pengisi data, atau petugas tidak memiliki data.
- Isian data yang tertera dalam instrumen telah sesuai dan benar, kecuali ada data yang sangat janggal dilakukan konfirmasi. Bila tidak dimungkinkan, maka dilakukan tindakan dengan cara melakukan inputasi data tidak lebih dari 5% dari total data.
- Hasil penelitian ini menunjukkan pencapaian program P4GN, serta dimensi yang mempengaruhinya. Tentunya, dimensi penyusun indeks ini belum sempurna karena harus menyesuaikan dengan indikator atau data yang tersedia pada dimensi tersebut di tiap ke deputian. Hasil ini memberikan gambaran dan cambuk bagi kita untuk memperbaiki kinerja program P4GN ke depannya.
- Kuantitas dan kualitas data dari SIN masih kurang untuk mendukung penyusunan indeks P4GN.

BAB 3

STRUKTUR DAN TUGAS POKOK & FUNGSI BNN

3.1 Tugas Utama dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia secara rinci telah diatur dalam Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Adapun tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, Kedeputian (Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi serta Hukum dan Kerja Sama), Inspektorat Utama dan Satuan Kerja unsur pendukung. Tugas-tugas yang didelegasikan kepada BNN kemudian diteruskan kepada BNN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2022, tugas utama BNN mencakup:

- a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b) upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika;
- c) koordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d) peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika;
- f) pemantauan, pengarahan, dan peningkatan aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- g) pelaksanaan kerja sama bilateral dan multilateral, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h) pengembangan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- i) pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terkait perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- j) penyusunan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban.

Selain itu, BNN juga bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, dengan pengecualian bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sejalan dengan pelaksanaan tugasnya, BNN menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b) penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, serta prosedur terkait Program P4GN;
- c) penyusunan perencanaan, program, dan penganggaran BNN;
- d) penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama dalam bidang P4GN;
- e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dalam aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama;
- f) Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g) Pengoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadan peran serta masyarakat;

- j) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k) pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l) pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m) pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n) peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o) pelaksanaan penyusunan, pengpenelitian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p) pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam bidang P4GN;
- q) pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap implementasi P4GN di lingkungan BNN;
- r) pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam bidang P4GN;
- s) pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t) pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u) pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- v) pengembangan laboratorium untuk pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, dengan pengecualian bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- w) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang P4GN.

3.2 Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Susunan organisasi BNN telah tertuang dalam Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BNN. Adapun tujuan daripada rumusan struktur organisasi adalah untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas BNN dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.

Susunan Organisasi BNN terdiri atas:

1. Kepala: Sebagai pimpinan BNN, Kepala BNN bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan kebijakan BNN;
2. Sekretariat Utama: mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN;
3. Deputi Bidang Pencegahan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN;
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN;
5. Deputi Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN;
6. Deputi Bidang Rehabilitasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN;

7. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN;
8. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN;
9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi merupakan unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama;
10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama;
11. Pusat Laboratorium Narkotika merupakan unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama; dan
12. Instansi Vertikal, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

3.3. Karakteristik Utama Susunan Organisasi BNN

Karakter utama dalam susunan organisasi BNN adalah adanya desentralisasi. Susunan organisasi BNN bersifat desentralisasi melalui BNN tingkat Provinsi dan BNN tingkat kabupaten/kota. Hal ini merupakan bentuk delegasi pembagian tugas dan tanggung jawab di daerah. Dengan demikian diharapkan BNN tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota akan lebih responsif terhadap permasalahan Narkotika.

Karakter lainnya adalah Kolaborasi. BNN bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Berikut akan dijelaskan program/kegiatan di tiap kedeputian secara garis besar, khususnya untuk pelaksanaan di tahun 2023.

3.4 Kedeputian Bidang Pencegahan

Program Pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN telah dirancang dengan pendekatan spesifik melalui kegiatan Informasi, Edukasi (IE), dan Advokasi untuk mencapai target indeks P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Program ini didukung oleh struktur organisasi yang kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat eselon 2, terdapat program ketahanan remaja yang memiliki tiga dimensi utama dan dilaksanakan secara komprehensif oleh BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) serta BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota). BNNP, misalnya, berfokus pada kegiatan pengembangan keterampilan lunak (soft skills), sementara BNNK melaksanakan program ketahanan keluarga.

Pada Direktorat Advokasi terdapat program ketahanan keluarga anti narkoba dan advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa (Desa Bersinar). Konsep ini merupakan bentuk kerja multi-kedeputian dan multi-sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa, provinsi, hingga nasional. Desa Bersinar berfungsi sebagai model kolaborasi lintas sektoral yang menyatukan peran berbagai kedeputian dalam upaya pencegahan.

Kekuatan utama dari Kedeputian Pencegahan terletak pada pendekatan "advokasi" dan "kolaborasi." Kedeputian ini berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional, memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target rencana strategis (renstra) meskipun dengan alokasi "input" yang lebih minim dibandingkan kedeputian lain. Dukungan regulasi yang kuat juga memberikan dasar hukum yang memperkuat upaya pencegahan di seluruh tingkatan.

3.5 Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat, yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mendorong ketangguhan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui dua pendekatan strategis, yakni peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan

berdaya tahan terhadap ancaman narkoba, dengan memobilisasi sumber daya lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat.

Dalam menentukan lokasi intervensi program Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan pemetaan kawasan rawan dengan menggunakan metode pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR), yang diukur pada tahun sebelumnya. Pemetaan ini penting agar intervensi dapat difokuskan pada kawasan dengan kriteria bahaya dan waspada, sehingga alokasi sumber daya dan program dapat lebih efektif.

Program lain yang dijalankan Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat sebagai langkah awal dalam mendeteksi kondisi sosial terkait penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan tes urine. Tes ini berfungsi sebagai strategi deteksi dini untuk melakukan pemetaan sosial di suatu lingkungan, guna mengetahui sejauh mana keterpaparan narkoba. Hasil dari kegiatan ini menjadi pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kolaborasi dan kemandirian para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. unsur pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat berperan aktif dalam program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif. Sinergi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan alternatif difokuskan pada pembangunan manusia berkelanjutan di kawasan tanaman terlarang dan kawasan rawan narkoba. Anggaran yang dialokasikan dapat lebih terfokus, tidak tersebar di seluruh wilayah, sehingga menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Pada tahun 2023, kunci keberhasilan program pemberdayaan alternatif ditekankan pada dua kondisi utama, yaitu keberalihan profesi dan alih fungsi lahan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tanaman terlarang.

3.6 Kedeputian Bidang Hukum dan Kerja Sama

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, yang merupakan satuan kerja pendukung dalam struktur organisasi, memiliki peran krusial dalam mendukung empat kedeputian lainnya untuk mencapai tujuan Program P4GN. Dalam pengukuran Indeks P4GN, Hukum dan Kerja Sama berfungsi sebagai penghubung dan penyedia

dukungan esensial, dengan tujuan utama untuk meningkatkan Indeks yang mencerminkan keberhasilan implementasi program.

Struktur Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama hanya terdapat di tingkat pusat, yang menegaskan peran sentralnya dalam merumuskan kebijakan dan regulasi. Produk Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mencakup regulasi, bantuan hukum, dan perjanjian kerja sama. Produk tersebut berfungsi sebagai “input” atau “modal kerja” bagi BNN baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, keberadaan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tidak hanya mendukung legalitas, tetapi juga memperkuat kerangka kerja sama yang diperlukan dalam pelaksanaan program P4GN.

Selain mendukung legalitas dan penyelenggaraan kerja sama, produk unggulan lain dari Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah pemberian bantuan hukum dan fasilitasi peran BNN di ajang internasional. Tim bantuan hukum dari Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menunjukkan kinerja sangat baik hampir di semua persidangan, mereka berhasil memenangkan kasus-kasus yang dihadapi. Peran mereka sangat penting, terutama dalam mendukung Tim Deputi Bidang Pemberantasan selama proses “penyelidikan” dan “penyidikan,” yang mendapat Gugatan Pra-peradilan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas tim dalam memberikan dukungan hukum berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama memiliki kewenangan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi, termasuk para *stakeholder* bidang hukum di tingkat nasional. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh semua pihak. Regulasi seperti peraturan badan dan peraturan kepala, menjadi pedoman penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedeputian.

Keberadaan dan kontribusi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperkuat fondasi kerja sama bagi seluruh kedeputian mencapai tujuan nasional dalam penanggulangan narkoba.

3.7 Kedeputian Bidang Pemberantasan

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diorganisir melalui tujuh direktorat yang memiliki fungsi spesifik dalam struktur operasional. Di antara direktorat tersebut, empat diantaranya berfokus pada penyidikan, satu direktorat khusus menangani pemetaan jaringan, dan satu direktorat bertanggung jawab atas penindakan, pengejaran, penahanan tahanan, serta penyimpanan barang bukti. Struktur ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuan P4GN.

Beberapa strategi diterapkan di bidang penegakan hukum, termasuk operasi intelijen, operasi rutin, dan operasi besar. Tingginya frekuensi operasi yang dilakukan menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam mendukung pencapaian Indeks P4GN. Operasi ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan narkoba.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi internasional, seperti lembaga di Amerika Serikat, merupakan elemen penting dalam pemberantasan narkoba. Kerjasama ini telah berkontribusi pada pembongkaran dan penangkapan jaringan internasional, sehingga mendukung pencapaian target indeks P4GN.

Pemanfaatan teknologi juga telah menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan. Penggunaan sistem e-Mindik untuk penyamaan persepsi dalam penyusunan berkas perkara memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik antar lembaga, sehingga meningkatkan koordinasi dan efektivitas tindakan hukum.

3.8 Kedeputian Bidang Rehabilitasi

Kedeputian Bidang Rehabilitasi memiliki peran penting dalam meningkatkan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dan penguatan lembaga rehabilitasi narkoba di Indonesia. Fokus utama Deputi Bidang Rehabilitasi adalah memastikan penyalah guna narkoba mendapatkan akses layanan rehabilitasi yang memadai dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut Deputi Bidang Rehabilitasi membagi sasaran kinerja menjadi tiga sasaran kegiatan. Sasaran pertama adalah membuka akses layanan rehabilitasi, di mana setiap individu yang membutuhkan dapat

menjangkau layanan tanpa hambatan. Sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang rehabilitasi, yang sangat penting untuk memastikan bahwa para tenaga profesional memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Sasaran ketiga adalah meningkatkan mutu layanan rehabilitasi yang tersedia.

Dari ketiga sasaran tersebut, terdapat dua fokus utama, yaitu rehabilitasi berbasis institusi dilaksanakan di lembaga rehabilitasi, dan rehabilitasi berbasis masyarakat (IBM) merupakan unit intervensi berbasis masyarakat. Kapasitas lembaga rehabilitasi yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan jika disetarakan dengan estimasi prevalensi penyalahgunaan narkoba. kebutuhan rehabilitasi diperkirakan sekitar 3 juta, saat ini kapasitas yang tersedia hanya sekitar 29 ribu, kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan.

Sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas rehabilitasi, IBM dijalankan oleh masyarakat di tingkat desa. Rehabilitasi melalui IBM dilaksanakan oleh agen pemulihan yang dilatih dan dibentuk oleh BNNP dan BNNK. Agen pemulihan berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengimplementasikan program rehabilitasi berbasis masyarakat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan dukungan.

BAB 4

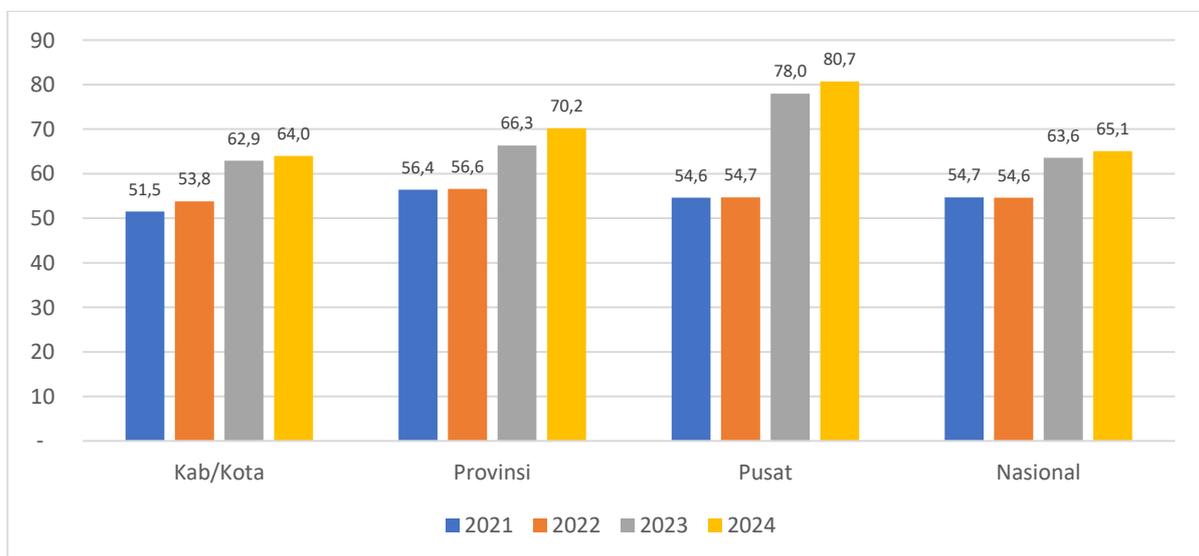
ANGKA INDEKS P4GN BNN

4.1 Angka Indeks P4GN Nasional

Grafik dibawah ini menyajikan data angka indeks P4GN periode tahun 2021 hingga 2024. Indeks ini diukur pada beberapa tingkatan, yaitu kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan nasional. Angka indeks nasional berfungsi sebagai agregasi kinerja seluruh wilayah, sedangkan indeks pusat mencerminkan kinerja institusi BNN di tingkat pusat. Angka yang tertera dalam tabel menunjukkan nilai atau nilai indeks pada masing-masing tingkatan dan tahun.

Tren Umum. Secara umum, data menunjukkan adanya tren peningkatan indeks P4GN dari tahun ke tahun, terutama pada tingkat pusat dan nasional, diikuti oleh tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang dicanangkan oleh BNN memberikan dampak cukup besar terhadap peningkatan indeks P4GN.

Gambar 4. Tren Angka Indeks P4GN menurut Jenjang, 2021-2024



Kabupaten/Kota: Terdapat peningkatan nilai dari 51,5 pada tahun 2021 menjadi 64,0 pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebesar 9,1 poin. Secara konsisten, grafik menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat lokal semakin membaik.

Provinsi: Kategori Provinsi juga menunjukkan kenaikan nilai selama empat tahun berturut-turut dari 56,4 pada tahun 2021 menjadi 70,2 pada tahun 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 9,7 poin. Tren ini menandakan adanya kemajuan signifikan di tingkat Provinsi.

Pusat: Pada kategori Pusat, terdapat pola yang cukup unik. Nilai pada tahun 2021 dan 2022 stabil di angka 54. Namun, pada tahun 2023, nilai melonjak drastis menjadi 78,0, sebelum kembali naik sedikit menjadi 81,7 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan percepatan signifikan dalam pencapaian di tingkat pusat pada dua tahun terakhir. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang dicanangkan oleh BNN dalam bidang P4GN cukup efektif.

Nasional: Kategori Nasional menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai tetap di angka 54. Kemudian, pada tahun 2023, nilai naik ke 63,6 dan meningkat lagi menjadi 65,1 pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini tidak secepat kategori Pusat, tetap terlihat tren pertumbuhan yang konsisten. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan menunjukkan upaya P4GN di Indonesia telah membuahkan hasil positif.

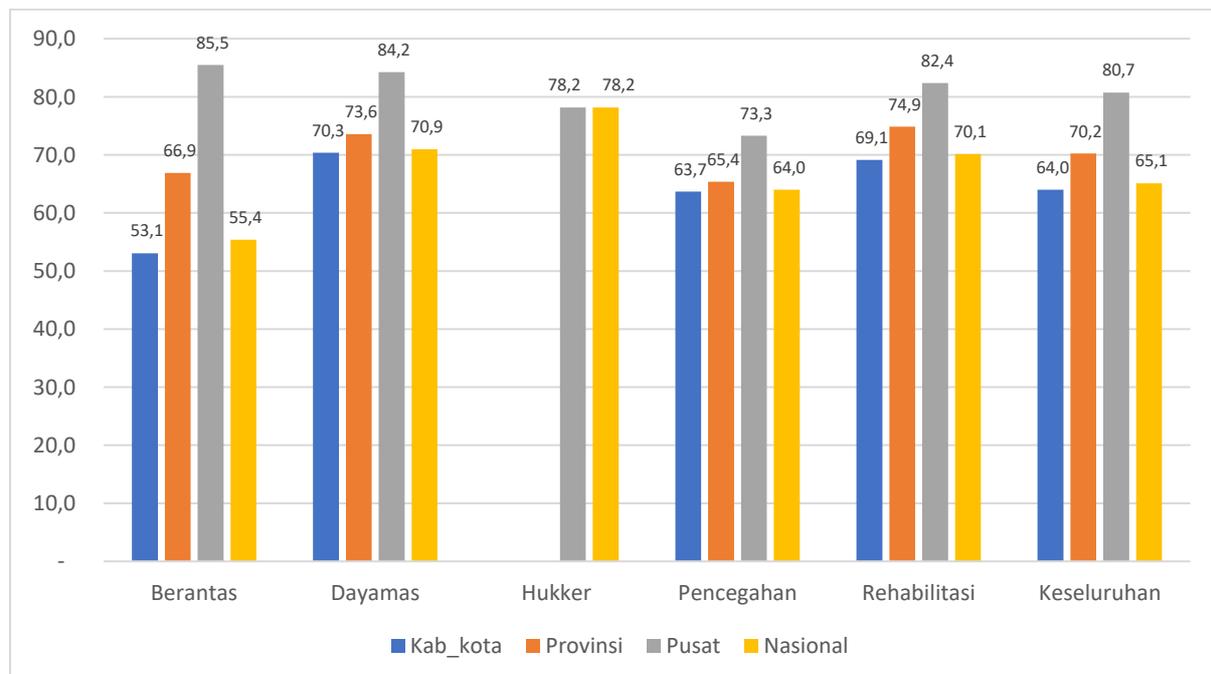
Perbandingan Antar Tingkat. Pada tahun 2021, angka indeks di Kab/Kota (51,5) berada di bawah Provinsi (56,4) dan Pusat (54,6), yang mencerminkan bahwa kinerja program di tingkat lokal masih membutuhkan perhatian lebih. Meskipun mengalami peningkatan, angka indeks Kab/Kota tetap di bawah Provinsi dan Pusat hingga tahun 2022. Pusat secara konsisten mempertahankan angka indeks tertinggi, terutama pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa implementasi strategi di tingkat pusat lebih efektif.

Secara keseluruhan, data indeks P4GN menunjukkan tren positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Namun, perbedaan yang signifikan antara tingkat Pusat dan Kab/Kota menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pelaksanaan program di tingkat lokal agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih merata di seluruh wilayah. Hal yang perlu diingat bahwa tantangan dalam bidang ini masih sangat kompleks dan membutuhkan upaya yang terus-menerus dari seluruh pihak.

4.2. Angka Indeks P4GN Kedeputian

Di BNN terdiri dari 5 (lima) kedeputian yaitu Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Pemberantasan, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. Dalam metode penghitungan angka indeks per kedeputian, meskipun di tingkat BNN Provinsi, dan Kab/Kota tidak terdapat pemisahan antara kedeputian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, namun pengukuran angka indeks P4GN tetap disusun secara terpisah untuk mencerminkan struktur kedeputian yang ada di tingkat pusat. Dengan demikian kita dapat melihat bagaimana kontribusi dari setiap kedeputian yang dapat mempengaruhi angka indeks secara keseluruhan. Angka Indeks P4GN berdasarkan kedeputian digambarkan melalui grafik sebagai berikut.

Gambar 5. Angka Indeks P4GN menurut Kedeputian & Jenjang



Program Deputi Bidang Pemberantasan: Tingkat efektivitas upaya pemberantasan narkoba menunjukkan variasi yang signifikan antar tingkat. Tingkat Pusat mencatat nilai tertinggi (85,5), yang mencerminkan efektivitas tinggi dalam pelaksanaan program pemberantasan di tingkat pusat. Tingkat Kabupaten/Kota memiliki nilai terendah (53,1), menunjukkan bahwa upaya pemberantasan di tingkat lokal masih memerlukan perhatian serius. Tingkat Provinsi (66,9) menunjukkan kinerja yang cukup baik, tetapi masih di bawah rata-rata Nasional (65,1). Tingkat Nasional (55,4) dikarenakan nilai Kabupaten/Kota yang rendah. Informan dari deputi bidang

pemberantasan menyampaikan bahwa “telah tercapai indeks P4GN yang baik di tingkat pusat, mencerminkan efektivitas program dan operasi yang telah dilakukan. Pencapaian ini menjadi indikator positif bagi upaya pemberantasan narkoba di Indonesia”.

Program Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Dalam program pemberdayaan masyarakat, **Pusat** memiliki nilai tertinggi (84,2), mencerminkan pengelolaan dan implementasi yang efektif di tingkat pusat. **Nasional (73,6)** memiliki nilai yang baik tetapi masih jauh di bawah Pusat. **Kabupaten/Kota (70,3)** dan **Provinsi (70,9)** memiliki nilai yang hampir seimbang, menunjukkan peran yang relatif serupa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kinerja ini mengindikasikan kebutuhan untuk lebih memperkuat kapasitas pemberdayaan di daerah.

Program Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama: Data komponen Hukum dan Kerja Sama tidak tersedia untuk semua tingkatan, karena tidak ada kepanjangan tangan Hukum dan Kerja Sama sampai ke jenjang provinsi dan kab/kota. Namun demikian berdasarkan kesepakatan tim dan masukan para stakeholder di BNN diputuskan bahwa di kedeputian Hukum dan Kerja Sama tidak dilakukan penghitungan angka indeks di tingkat provinsi dan kab/kota akan tetapi hanya pada tingkat pusat.

Program Pencegahan merata di setiap tingkatan: Deputi pencegahan memiliki nilai yang cukup berimbang di semua tingkatan (tidak jauh berbeda). **Pusat** memiliki nilai tertinggi (73,3), menegaskan efektivitas program nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. **Kabupaten/Kota (63,7)** dan **Provinsi (65,4)** mencatat nilai lebih rendah, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas untuk memperkuat inisiatif lokal. **Nasional (64,0)** berada sedikit di atas Kabupaten/Kota tetapi masih jauh dari tingkat Pusat, menunjukkan ruang untuk perbaikan dalam sinkronisasi dan pelaksanaan program pencegahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan informan dari deputi pencegahan bahwa “Pencapaian nilai indeks yang lebih baik di tingkat pusat disebabkan oleh kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih banyak dibandingkan dengan BNNP dan BNN Kab/Kota, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai desain dan tujuan program”.

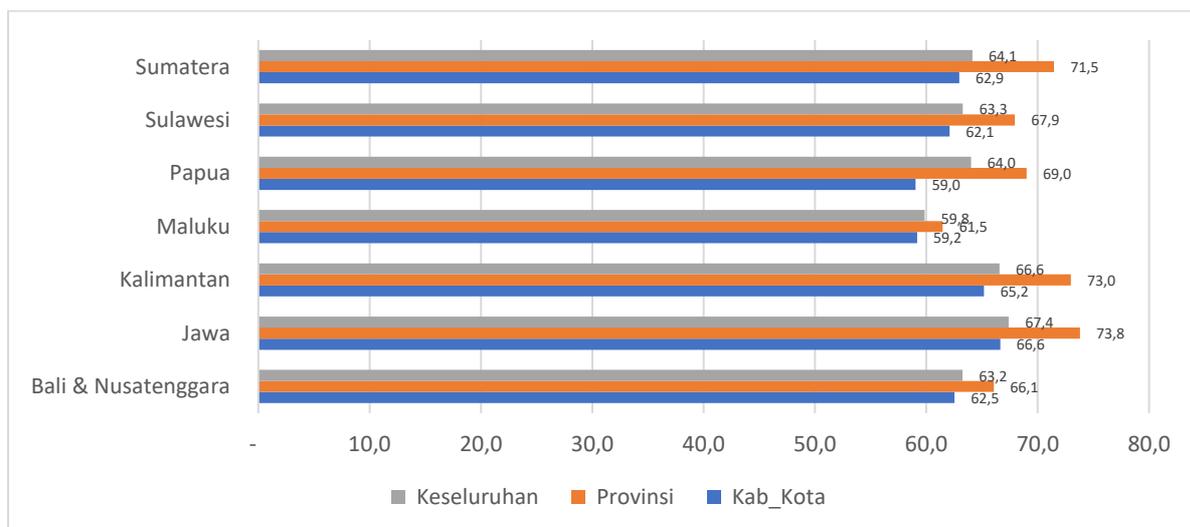
Deputi Bidang Rehabilitasi: Dalam kategori rehabilitasi, **Pusat** mencatat nilai tertinggi (82,4), menunjukkan keberhasilan dalam memberikan layanan rehabilitasi. **Provinsi (74,9)** dan **Nasional (70,1)** mencatat nilai yang cukup tinggi, sementara **Kabupaten/Kota (69,1)** berada di posisi terendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa layanan rehabilitasi di tingkat lokal memerlukan dukungan lebih besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas.

Secara keseluruhan: Pusat menunjukkan performa terbaik dengan nilai 80,7, mencerminkan pengelolaan dan implementasi program yang kuat. **Provinsi (70,2)** berada di posisi kedua, sementara **Kabupaten/Kota (64,0)** mencatat nilai terendah. **Nasional (65,1)** sedikit lebih baik dari Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan di tingkat yang lebih luas. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat lokal memerlukan perhatian khusus untuk mencapai kesetaraan efektivitas dengan tingkat lainnya.

4.3 Angka Indeks P4GN Menurut Wilayah Regional

Angka indeks P4GN berdasarkan regional bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan P4GN yang terdistribusi di wilayah kepulauan terbesar di Indonesia. Dalam penghitungan angka indeks ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 (enam) wilayah regional, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku, serta Bali dan Nusa Tenggara. Pembagian ini tidak hanya berfungsi sebagai refleksi atas pencapaian kinerja P4GN sesuai dengan distribusi pulau yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang memerlukan fokus intervensi P4GN, sehingga upaya penanganan dapat lebih terarah pada daerah yang berada dalam cakupan kepulauan tersebut. Sebaran angka indeks P4GN berdasarkan wilayah regional sebagaimana pada gambar 6 berikut:

Gambar 6. Angka Indeks P4GN menurut Pulau, 2024



Indeks P4GN menurut regional tertinggi di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Jika dilihat dari angka keseluruhan, Jawa dan Kalimantan memiliki nilai indeks regional tertinggi, yaitu 67.4 dan 66.6. Hal ini menunjukkan bahwa kedua wilayah ini memiliki kinerja atau tingkat pencapaian yang lebih baik dibandingkan wilayah regional lainnya.

Variasi Antara Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ada perbedaan signifikan antara angka pada kategori kab/kota dan provinsi di beberapa wilayah. Seperti halnya yang terjadi di Papua dengan angka indeks di tingkat kab/kota sebesar 59.0, sementara angka indeks pada tingkat provinsi mencapai 69.0. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar terhadap kualitas kinerja atau tingkat capaian antara tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

Kesenjangan di Maluku. Maluku memiliki nilai yang cukup rendah di ketiga kategori dibandingkan wilayah lain. Hal ini dapat disebabkan wilayah Maluku memiliki tantangan khusus sehingga menghambat pelaksanaan kinerja dan pencapaian program P4GN baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut informan dari Deputi Bidang Rehabilitasi “Pada tingkat nasional, isu pemerataan lembaga rehabilitasi masih menjadi tantangan, terutama di wilayah timur Indonesia. Pada 4 (empat) provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat hanya BNNP dan BNN Kab/Kota yang menyediakan layanan rehabilitasi. Hingga saat ini, belum ada lembaga lain seperti rumah sakit yang menyediakan layanan rehabilitasi, sehingga mengakibatkan keterbatasan akses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di daerah tersebut”.

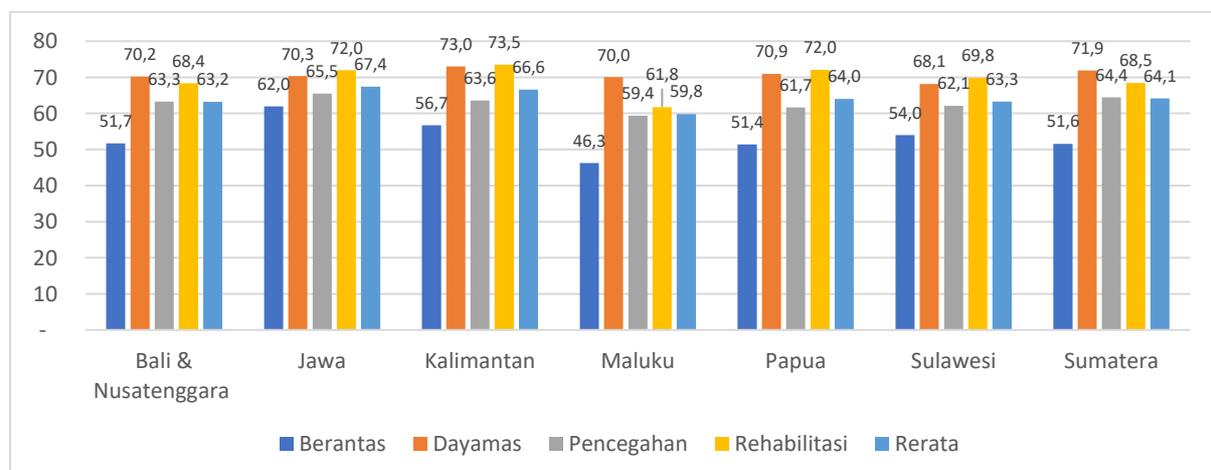
Kecenderungan nilai indeks lebih tinggi pada tingkat provinsi. Secara umum, angka indeks di tingkat provinsi lebih tinggi daripada tingkat kab/kota. Hal ini dapat disebabkan karena pada tingkat provinsi memiliki akses atau sumber daya yang lebih baik dibandingkan kab/kota.

Rata-rata angka indeks regional. Rata-rata angka indeks regional berkisar antara 59.8 hingga 67.4. Wilayah Jawa memiliki angka indeks regional tertinggi, sementara Maluku memiliki angka indeks regional yang terendah.

4.4 Angka Indeks P4GN Menurut Kedepuitan dan Wilayah Regional

Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap angka indeks P4GN tahun 2024 berdasarkan kedepuitan dan wilayah regional. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas dan capaian program P4GN berdasarkan wilayah regional di Indonesia pada masing-masing kedepuitan. Pada kedepuitan bidang pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, pencegahan, dan rehabilitasi diukur secara terpisah di masing-masing wilayah regional untuk mencerminkan perbedaan konteks geografis dan operasional yang dihadapi. Pemisahan ini diharapkan mampu memberikan pandangan komprehensif mengenai kinerja tiap kedepuitan, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi dan dukungan lebih lanjut. Berikut adalah analisis data yang merangkum capaian indeks P4GN per kedepuitan dan regional pada tahun 2023 sebagaimana hasil angka indeks P4GN pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Angka Indeks P4GN menurut Pulau & Kedepuitan, 2024



Secara keseluruhan, kinerja setiap bidang di berbagai pulau menunjukkan variasi yang signifikan.

Bidang Pemberantasan cenderung memiliki nilai terendah di semua wilayah, mencerminkan tantangan besar dalam pelaksanaan program ini. Maluku memiliki nilai terendah di bidang ini yaitu 46,3, sementara Bali & Nusa Tenggara serta Sumatera juga mencatat nilai rendah masing-masing sebesar 51,7 dan 51,6. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih besar terhadap strategi pemberantasan di wilayah-wilayah ini.

Sebaliknya, Pemberdayaan Masyarakat mencatat kinerja yang cukup baik di hampir semua wilayah. Kalimantan mencatat nilai tertinggi sebesar 73,0, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam implementasi program pemberdayaan. Wilayah-wilayah seperti Sumatera dan Papua juga menunjukkan hasil yang cukup baik di bidang ini, masing-masing dengan nilai 71,9 dan 70,9.

Bidang Pencegahan menunjukkan stabilitas yang moderat di seluruh wilayah. Nilai tertinggi untuk bidang ini dicapai oleh Jawa (65,5) diikuti Sumatera 64,4 dan Kalimantan (63,6). Maluku, meskipun memiliki nilai yang lebih rendah di bidang ini (59,4), masih menunjukkan hasil yang relatif stabil dibandingkan bidang lain di wilayah tersebut.

Bidang Rehabilitasi juga menunjukkan hasil yang baik, dengan Maluku menjadi wilayah dengan nilai yang cukup baik (61,8) meskipun wilayah ini secara keseluruhan memiliki rata-rata terendah. Kalimantan kembali menjadi wilayah dengan nilai tertinggi dalam bidang ini (73,5), menegaskan efektivitas program rehabilitasi di wilayah tersebut.

Rata-rata angka indeks pada wilayah regional. Wilayah Jawa memiliki nilai indeks rerata tertinggi (67,4), hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja program P4GN di kedua wilayah ini relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, Maluku memiliki nilai indeks rerata terendah (59,8), yang menunjukkan perlu adanya peningkatan pada semua aspek program di wilayah ini. Kinerja yang relatif lebih tinggi di wilayah Jawa dan Kalimantan dapat disebabkan adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang lebih besar dibanding wilayah lain, sehingga dapat mendukung keberhasilan penerapan program P4GN.

Wilayah Bali & Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan Sumatera memiliki nilai rerata yang berada di rentang 63–64, hal ini menandakan adanya tingkat efektivitas yang cukup konsisten pada masing-masing kedeputian, namun tetap diperlukan upaya peningkatan terutama pada kedeputian bidang pemberantasan dan rehabilitasi. Maluku dengan rerata terendah menghadapi tantangan dalam capaian pelaksanaan program P4GN. Rendahnya angka indeks pada kedeputian bidang pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi mengindikasikan perlunya peningkatan alokasi sumber daya dan strategi intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Analisis angka indeks P4GN di berbagai wilayah menunjukkan adanya perbedaan efektivitas program P4GN berdasarkan regional. Wilayah Jawa dan Kalimantan sebagai wilayah dengan angka indeks tertinggi secara keseluruhan dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain dalam meningkatkan capaian kinerjanya. Di sisi lain, wilayah Maluku memerlukan peningkatan yang signifikan pada berbagai aspek untuk mencapai hasil yang optimal dalam program P4GN.

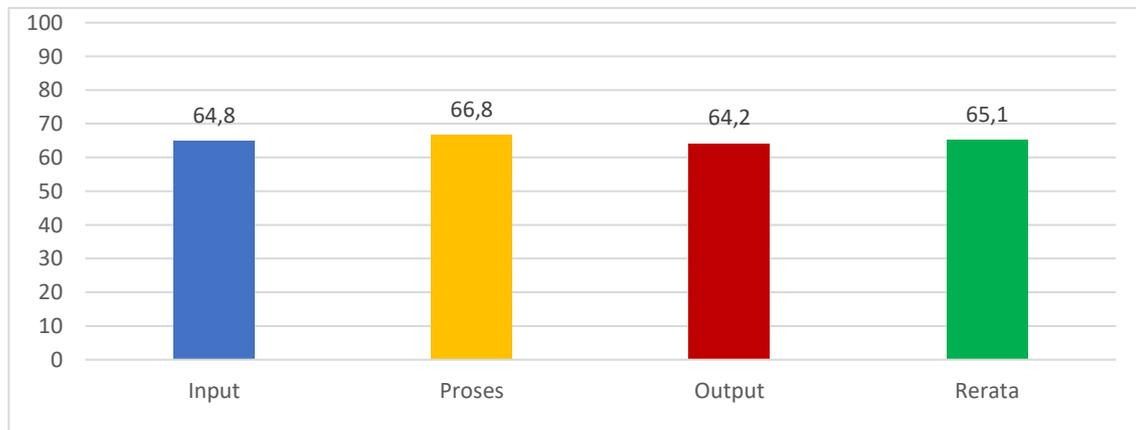
4.5. Angka Indeks P4GN Nasional Menurut Input-Proses-Output/Outcome (IPO)

Angka indeks P4GN berdasarkan pendekatan Input-Proses-Output/Outcome (IPO) disusun dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi utama yang mencakup sejumlah variabel penunjang tanpa penerapan bobot (weight). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai perbandingan hasil indeks P4GN dalam kerangka IPO sebelum pemberian bobot. Dengan demikian, analisis ini dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan pada tiap tahap dalam pelaksanaan program P4GN.

Grafik dibawah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu input, proses, dan output/outcome. **Input**, bisa diartikan sebagai sumber daya atau upaya yang dimasukkan ke dalam sistem. Angka-angka di kolom ini mungkin mewakili alokasi anggaran, jumlah personel, atau intensitas kampanye yang dilakukan. **Proses**, merepresentasikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program. Angka-angka di sini mungkin mencerminkan efisiensi pelaksanaan program, kualitas koordinasi, atau inovasi yang diterapkan. Terakhir, **Output/Outcome** adalah hasil langsung dari proses yang dilakukan. Angka ini menunjukkan sejauh mana

tujuan program tercapai, misalnya peningkatan jumlah kasus yang ditindak, jumlah orang yang direhabilitasi, jumlah desa yang menerapkan desa bersinar, dsb.

Gambar 8. Angka Indeks P4GN Nasional menurut Input-Proses-Output, 2024



Input. Nilai 64,8 pada indikator input menunjukkan bahwa sumber daya awal, seperti anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja, sudah tersedia pada tingkat yang mendekati standar rata-rata. Meskipun memadai, nilai ini mengindikasikan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam hal optimalisasi sumber daya yang dapat meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Berikut tanggapan informan dari tiap kedeputian atas input.

Di kedeputian bidang Pencegahan BNN menghadapi tantangan akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ini, regulasi-regulasi yang ada menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan. Jumlah penyuluh yang tersedia saat ini masih tergolong sedikit. Pada tingkat BNN Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), meskipun terdapat pelaksana, mereka umumnya berfungsi sebagai penyuluh namun sering kali diperbantukan pada unit-unit lain, sehingga mengurangi fokus mereka dalam kegiatan pencegahan. Penyuluh yang tidak termasuk dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) tidak mendapatkan kredit penilaian kinerja, yang berimplikasi pada perbedaan tingkat motivasi, penghargaan, serta kepercayaan diri dalam menjalankan program pencegahan yang telah ditetapkan.

Dengan lebih dari 83 ribu desa yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia, alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih sangat terbatas dan hanya menjangkau sebagian kecil dari desa-desa tersebut. Oleh karena itu, kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkat sangat diperlukan dan menjadi

bagian integral dari "target kolaborasi" dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di kedeputian bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kuantitas SDM yang berfokus pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, terutama fungsional penggerak swadaya masyarakat, masih sangat terbatas di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Akibatnya, fungsi pemberdayaan masyarakat sering kali dijalankan oleh SDM dari bidang lain. Untuk mengatasi kekurangan SDM ini, dilakukan kolaborasi khususnya melalui pembentukan penggiat Program P4GN, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara mandiri di lingkungan mereka.

Selain itu, untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, Direktorat Pemberdayaan Alternatif berhasil memperoleh dukungan dari kegiatan kementerian/lembaga (K/L), dana hibah pemerintah daerah, serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis keterampilan hidup di beberapa lokasi. Peran aktif penggiat P4GN sangat penting dalam menciptakan kemandirian di lingkungan masyarakat dan instansi, sehingga mereka dapat menyelenggarakan kegiatan P4GN secara mandiri.

Di kedeputian bidang Hukum dan Kerja Sama, terdapat kekurangan SDM di Direktorat Hukum, terutama disebabkan oleh belum adanya pegawai fungsional yang bertugas sebagai penyuluh hukum dan analis hukum. Selain itu, jumlah jabatan fungsional yang terkait dengan perancang perundangan serta analis kebijakan juga masih sangat terbatas.

Di kedeputian bidang Pemberantasan, pendanaan dan sumber daya yang tersedia masih memerlukan peningkatan, khususnya di tingkat daerah, termasuk BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Di kedeputian bidang rehabilitasi, kapasitas lembaga rehabilitasi saat ini masih jauh dari kebutuhan yang diperkirakan berdasarkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Dari estimasi kebutuhan layanan rehabilitasi untuk sekitar 3 juta orang, saat ini hanya tersedia kapasitas untuk 29 ribu individu, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Selain itu, pendanaan dan sumber daya yang mendukung kegiatan rehabilitasi masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat daerah.

Proses. Nilai pada indikator proses adalah 66,8, yang merupakan nilai tertinggi di antara ketiga indikator (Input-Proses-Output/Outcome). Hal ini menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan atau operasionalisasi program berjalan cukup baik. Ini dapat mencakup koordinasi antarlembaga, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi prosedur yang digunakan dalam implementasi program P4GN.

Di kedeputian Bidang Pencegahan BNN terus berupaya mengidentifikasi potensi kolaborasi program di tingkat pusat, khususnya dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kementerian Desa. Dalam upaya meningkatkan pendidikan, Kedeputian Bidang Pencegahan bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan diversifikasi kurikulum, di mana muatan materi terkait Program P4GN dimasukkan ke dalam kurikulum. Data yang diperoleh dari BNNP dan BNN Kab/Kota berfungsi sebagai basis kerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Selain itu, Kedeputian Bidang Pencegahan juga menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam pengembangan konten dan penyebaran informasi edukatif (IE). Untuk mendukung monitoring dan evaluasi (Monev), Kedeputian ini memanfaatkan potensi yang ada, salah satunya melalui fitur "menu" dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pencegahan (Sidepe). Salah satu potensi yang dimanfaatkan untuk Monev secara *real-time* adalah advokasi yang mencakup pembagian zona untuk meningkatkan tata kelola, dengan melibatkan 51-54 satuan kerja (satker) dalam proses Monev. Poin utama dari inisiatif ini adalah mengatasi perbedaan dalam pencatatan dan perekaman data output dari lapangan.

Kedeputian Bidang Pencegahan juga melakukan berbagi anggaran untuk pelatihan teknis (Bimtek) dengan kedeputian lainnya. Selain itu, ada kerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* untuk pelatihan program ketahanan keluarga, yang ditujukan untuk para pendamping dan fasilitator dalam program ketahanan keluarga.

Di kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi SDM di bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat diindikasikan sebagai salah satu penyebab kurang maksimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya mendorong keberhasilan program, koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan melalui regulasi,

pembentukan tim terpadu, pembentukan satuan tugas (satgas), serta alokasi program dan anggaran merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan.

Selain itu, kebijakan alokasi anggaran yang fluktuatif menyebabkan target kinerja tidak dapat meningkat secara konsisten setiap tahun. Namun, melalui sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta dunia usaha, diharapkan dapat membantu meningkatkan capaian kinerja dalam program pemberdayaan masyarakat.

Di kedeputian bidang Hukum dan Kerja Sama, dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (Monev), dilakukan deregulasi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan melalui proses revisi. Selanjutnya, dalam konteks bantuan hukum, upaya yang telah dilaksanakan mencakup koordinasi dengan instansi kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Di kedeputian bidang Pemberantasan, terdapat tantangan signifikan dalam mengadaptasi modus operandi baru, mengingat jaringan gelap narkoba sangat progresif dalam perubahan strategi operasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika tersebut.

Di kedeputian bidang Rehabilitasi, fungsi pengawasan di bidang rehabilitasi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat provinsi (BNNP) dan kabupaten/kota (BNNK), guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan rehabilitasi.

Output/Outcome. Nilai 64.2 pada indikator output/outcome, yang merupakan nilai terendah, menunjukkan bahwa hasil akhir dari pelaksanaan program P4GN di bawah tingkat input dan proses. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai dampak yang diharapkan, yang mungkin dipengaruhi oleh kendala dalam sumber daya awal atau efisiensi proses. Berikut tanggapan terhadap hasil capaian output/outcome berdasarkan informan dari masing-masing kedeputian.

Di kedeputian bidang Pencegahan, capaian kegiatan Pencegahan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah berhasil tercapai, baik dari segi jumlah target yang ditentukan maupun realisasi anggaran yang ada, terutama dengan adanya dukungan tambahan melalui kegiatan non-DIPA. Program pencegahan telah berhasil memenuhi target Rencana Strategis (Renstra) dan telah sejalan dengan

indeks P4GN. Namun, meskipun capaian ini positif, hingga saat ini belum ada indikator yang jelas untuk menilai efektivitas dan efisiensi kolaborasi yang dilakukan. Dari perspektif Deputi Bidang Pencegahan, evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlah Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani, tetapi juga harus melibatkan pengukuran terhadap partisipasi dari target populasi program, yaitu remaja dan keluarga, serta keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah dan desa.

Di Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, capaian target untuk kota tanggap narkoba, yang dikategorikan sebagai sangat tanggap dan tanggap, pada tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, capaian lembaga yang diadvokasi dalam program Kota Tanggap Narkoba (KOTAN) juga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam hal peran serta masyarakat, keberhasilan program diukur melalui indeks kemandirian partisipatif, yang pada tahun ini menunjukkan pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tercermin di berbagai lingkungan, termasuk pendidikan, pemerintahan, swasta, dan masyarakat umum.

Realisasi capaian kawasan rawan yang berhasil dipulihkan juga telah melampaui target. Pemulihan ini tidak hanya disebabkan oleh program Pemberdayaan Masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh program P4GN lainnya, serta dukungan anggaran dan regulasi dari para pemangku kepentingan.

Dukungan dari dunia usaha, khususnya PT Ujang Jaya Internasional, yang berperan sebagai distributor, telah memberikan kontribusi signifikan dengan membeli hasil panen sebanyak 396 ton kopi dari 1.007 petani binaan program Gerakan Desa Adat dan Daya (GDAD) di Aceh. Petani-petani tersebut telah disertifikasi oleh Starbucks dan mengelola lahan budidaya seluas ± 1.500 Ha, dengan nilai omzet mencapai Rp 29.631.000.000,-. Kontribusi ini menjadi pemicu bagi tujuh dari sebelas kota di Aceh untuk masuk dalam kategori tanggap terhadap ancaman narkoba.

Di Kedeputan Bidang Hukum dan Kerja Sama, target telah tercapai, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah target yang berhasil diraih dan realisasi anggaran yang telah mencukupi, meskipun belum mencapai 100%. Di tingkat pusat, sebagai kedeputan pendukung, telah dilakukan upaya optimal dalam mendukung tugas dan fungsi kedeputan program terkait dengan P4GN. Dalam konteks

internasional, telah terjalin hubungan yang baik dengan negara lain dan agen internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Di Kedeputan Bidang Pemberantasan, target telah tercapai, yang dapat dilihat dari jumlah berkas yang telah mencapai status P21, pengungkapan jaringan, serta penangkapan pelaku operasional (PO) dan daftar pencarian orang (DPO) yang telah memenuhi sasaran. Pemusnahan titik lahan terlarang juga telah berhasil dilaksanakan, dan laporan dari perusahaan importir prekursor narkotika telah mencapai target yang ditetapkan. Dalam aspek keamanan, baik tahanan maupun barang bukti telah dalam kondisi yang "aman," tanpa adanya laporan mengenai pelarian tahanan atau kehilangan barang bukti.

Di Kedeputan Bidang Rehabilitasi, target rehabilitasi telah tercapai, yang ditunjukkan melalui jumlah layanan rehabilitasi yang telah diberikan serta pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Selain itu, jumlah pemberi layanan di lembaga rehabilitasi dan agen pemulihan di IBM telah sesuai dengan target yang ditetapkan, menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat.

Rerata. Nilai rata-rata sebesar 65.1 menunjukkan performa keseluruhan yang relatif seimbang di antara ketiga dimensi. Namun, masih terdapat kesempatan untuk meningkatkan angka indeks pada setiap tahapan, terutama dalam output, agar pencapaian program P4GN dapat lebih optimal.

Data ini menunjukkan bahwa tahapan proses memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan input dan output/outcome. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, terdapat kendala dalam konversi input menjadi output/outcome yang diharapkan. Rendahnya nilai output/outcome dibandingkan input dan proses dapat mengindikasikan perlunya evaluasi pada efektivitas strategi dan pendekatan yang digunakan agar hasil yang dicapai lebih sesuai dengan target program. Secara keseluruhan, program P4GN memiliki potensi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi jika terjadi peningkatan dalam alokasi dan pemanfaatan sumber daya (input) serta penyelarasan antara tahap proses dan output/outcome.

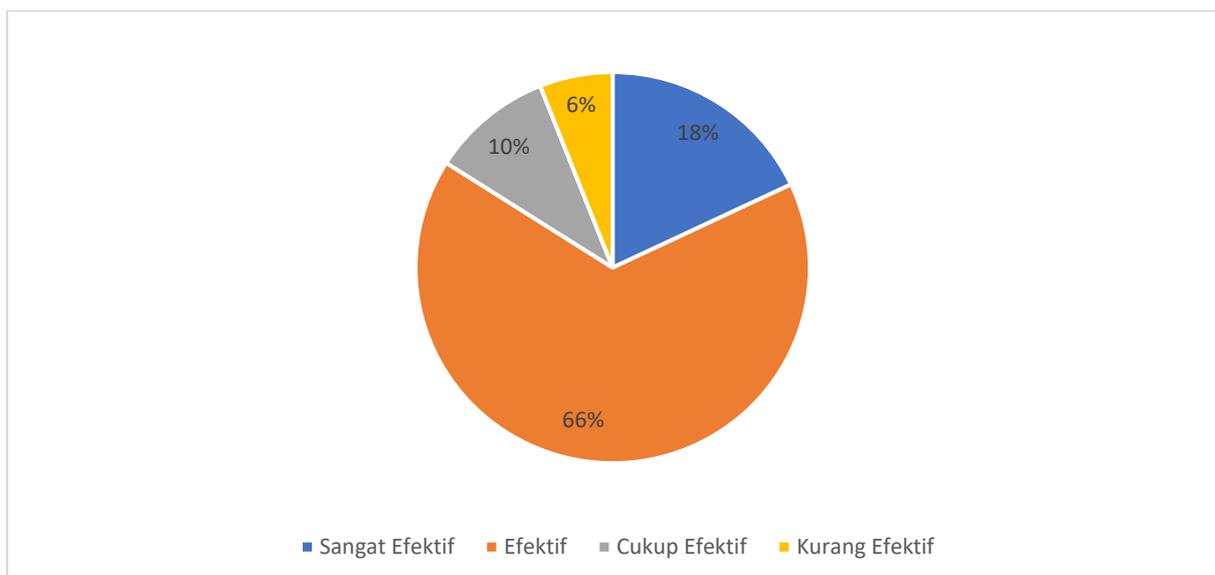
BAB 5. ANGKA INDEKS P4GN DAERAH

Angka indeks P4GN daerah akan menguraikan hasil pencapaian pada dua tingkatan, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota, secara terperinci berdasarkan lokasi. Pada setiap tingkatan, akan dibahas hasil angka indeks berdasarkan lokasi dan kedeputian, serta sistem (input, proses, dan output). Hasil angka indeks P4GN tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi masing-masing daerah pada setiap tingkatan untuk merencanakan perbaikan program dan kegiatan P4GN di tahun-tahun mendatang.

5.1 Kategori Angka Indeks P4GN Tingkat Provinsi

Angka indeks P4GN provinsi mencerminkan hasil pencapaian kinerja program P4GN yang dilakukan oleh BNN Provinsi. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, efektivitas program P4GN di tingkat provinsi cukup baik, sekitar 66% dari provinsi berada pada kategori "Efektif" dan 18% dari provinsi pada kategori "Sangat Efektif." Tingginya persentase provinsi dalam dua kategori teratas mengindikasikan keberhasilan program yang cukup merata di tingkat provinsi, menunjukkan bahwa banyak provinsi mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Gambar 9. Kategori Indeks P4GN Tingkat Provinsi, 2024



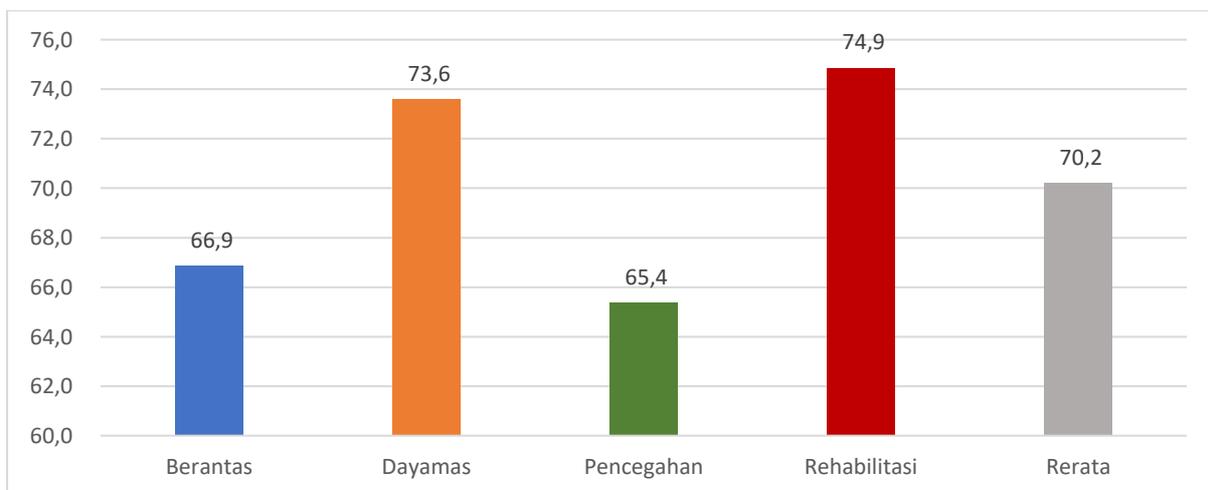
Namun, terdapat juga provinsi dalam kategori "Cukup Efektif" (10% provinsi) dan "Kurang Efektif" (6% provinsi), yang menunjukkan adanya kebutuhan akan intervensi tambahan untuk mengoptimalkan efektivitas program di wilayah-wilayah tersebut. Provinsi-provinsi yang berada dalam kategori ini dapat dijadikan prioritas dalam evaluasi dan pengembangan strategi untuk meningkatkan pencapaian program P4GN secara keseluruhan.

Secara umum, hasil ini memberikan panduan bagi perbaikan yang perlu dilakukan di tingkat provinsi, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari provinsi-provinsi yang telah mencapai kategori "Sangat Efektif."

5.2 Angka Indeks P4GN Provinsi Menurut Kedeputan

Data ini menunjukkan indeks P4GN pada tingkat provinsi menurut kedeputan, berikut analisisnya:

Gambar 10. Angka Indeks P4GN Provinsi berdasarkan Kedeputan, 2024



Indeks Tertinggi pada Bidang Rehabilitasi. Kategori Rehabilitasi memiliki nilai tertinggi di 74.9, menunjukkan bahwa program rehabilitasi di tingkat provinsi berjalan dengan baik atau mendapatkan perhatian lebih. Ini bisa menandakan bahwa upaya pemulihan bagi para penyalahguna narkoba mendapat prioritas dan dukungan yang kuat di provinsi. Hal ini diperkuat oleh informan dari deputy bidang rehabilitasi yang menyatakan "Di tingkat provinsi, telah ada upaya yang signifikan untuk mencapai target P4GN, dan hasilnya menunjukkan bahwa pencapaian tersebut sebanding dengan usaha yang dilakukan."

Kategori Bidang Pemberdayaan Masyarakat. pemberdayaan masyarakat memiliki nilai 73.6, yang juga tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat cukup kuat di tingkat provinsi, melalui peningkatan kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurut informan dari kedeputian bidang pemberdayaan masyarakat, “ditingkat provinsi upaya untuk menyelenggarakan program secara efektif telah dilakukan dengan memaksimalkan kolaborasi dan kerja sama dengan para stakeholder. Hal ini menunjukkan komitmen dan keinginan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanggulangan narkoba”.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui advokasi kota tanggap narkoba, yang bertujuan untuk mendorong ketanggapan wilayah dalam melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri. Pemberdayaan alternatif juga dilakukan di kawasan rawan tanaman terlarang yang mendapat dukungan anggaran. Hasil pengukuran Indeks P4GN sejalan dengan hasil pengukuran IKOTAN, menunjukkan bahwa banyak kota/kabupaten telah melebihi target yang ditetapkan dalam hal ketanggapan.

Angka Indeks Bidang Pemberantasan. Bidang Pemberantasan memiliki nilai 66.9, yang lebih rendah dibandingkan bidang Rehabilitasi dan bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan peredaran narkoba telah dilakukan, masih ada tantangan yang lebih besar atau hambatan dalam pelaksanaannya dibandingkan kategori lainnya. Menurut informan dari kedeputian bidang pemberantasan “Masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami kekurangan input, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, yang mengakibatkan proses pemberantasan berjalan seadanya dalam mencapai indeks P4GN. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam alokasi sumber daya untuk wilayah-wilayah tersebut”.

Angka Indeks Bidang Pencegahan. Dengan nilai 65.4, Bidang Pencegahan adalah yang terendah di antara keempat bidang. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat di tingkat provinsi. Meningkatkan kegiatan edukasi, sosialisasi, atau pelibatan masyarakat untuk pencegahan bisa menjadi fokus tambahan untuk meningkatkan indeks bidang pencegahan. Menurut informan dari kedeputian bidang Pencegahan “BNNP telah bekerja keras untuk mencapai target

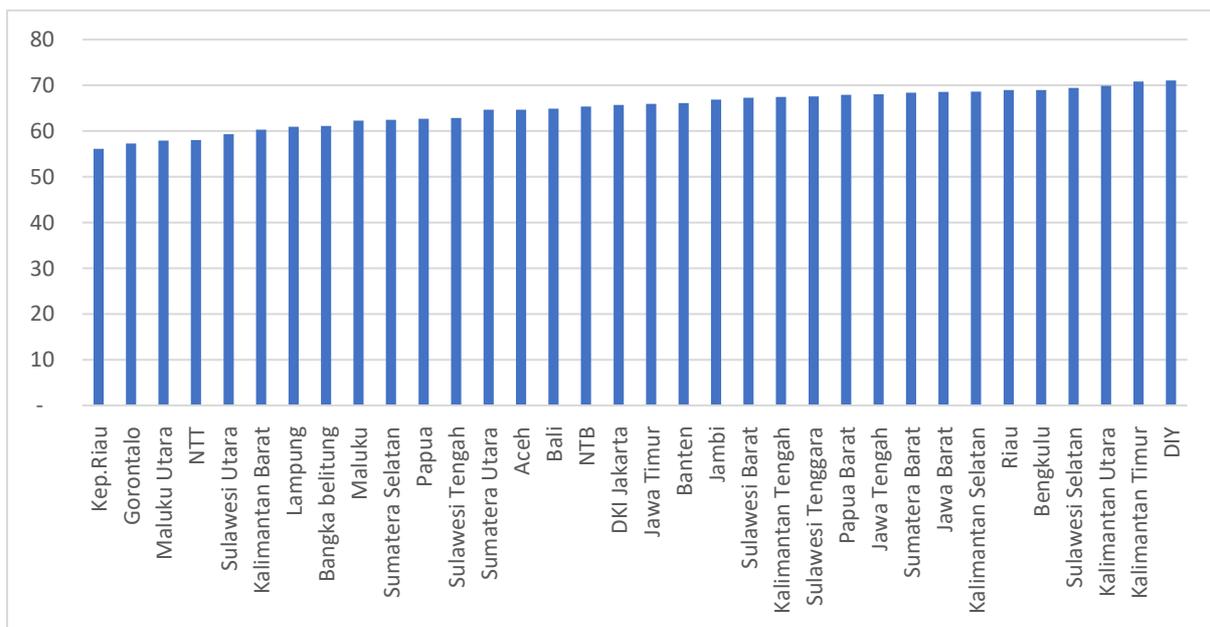
yang ditetapkan dalam program bidang pencegahan. Upaya ini mencakup pelaksanaan program ketahanan remaja, *soft skills*, serta advokasi ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa”.

Rata-Rata Indeks yang Tinggi. Nilai Rerata adalah 70.2, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, indeks P4GN di tingkat provinsi cukup baik. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam kategori bidang Pencegahan dan bidang Pemberantasan, agar seluruh aspek P4GN dapat lebih seimbang.

5.3 Angka Indeks P4GN Tingkat Provinsi

Data ini menampilkan angka indeks P4GN dari seluruh provinsi di Indonesia dengan rentang nilai dari 56 hingga 71. Berikut adalah analisis dan interpretasi data tersebut:

Gambar 11. Angka Indeks P4GN menurut Provinsi, 2024



Distribusi Nilai. Rentang nilai terendah dimulai dari 56,1 (Kepulauan Riau) hingga nilai tertinggi 71,0 D.I. Yogyakarta. Nilai sebagian besar provinsi berkisar antara 60 hingga 70, yang menunjukkan persebaran nilai dengan rentang yang kecil di sekitar rata-rata.

Kategorisasi Berdasarkan Nilai. Nilai Rendah (56-60), Kelompok provinsi ini mencakup Kepulauan Riau, Gorontalo, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini memiliki nilai yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Nilai Sedang (61-66), Sebagian besar provinsi berada pada rentang ini, seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Banten. Provinsi-provinsi ini berada di tengah distribusi nilai.

Nilai Tinggi (67-71), Provinsi seperti Kalimantan Timur, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Utara memiliki nilai yang lebih tinggi, menunjukkan capaian kinerja yang lebih unggul dalam variabel yang diukur.

Rata-rata Nilai. Berdasarkan pengamatan, rata-rata nilai berada di kisaran 60. Mayoritas provinsi memiliki nilai antara 60 hingga 69, yang menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi berada di tengah-tengah dalam hal pencapaian kinerja. Ini mengindikasikan keseragaman atau pemerataan kinerja yang cukup baik di berbagai provinsi, dengan beberapa provinsi yang menonjol di kedua ujung spektrum.

Distribusi Nilai di Pulau Jawa. Provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, memiliki nilai yang relatif tinggi (66–69). Ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki keunggulan dalam akses ke sumber daya, infrastruktur, atau implementasi program yang lebih efektif dibandingkan beberapa provinsi di luar Jawa.

Kesempatan Peningkatan di Provinsi dengan Nilai Rendah. Provinsi-provinsi dengan nilai di bawah rata-rata, seperti Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Maluku Utara, dapat menjadi fokus untuk peningkatan. Program peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, atau peningkatan infrastruktur mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka.

Provinsi di Kalimantan dan Sulawesi dengan Performa Beragam. Kalimantan dan Sulawesi memiliki variasi nilai yang cukup lebar, mulai dari 57,3 (Gorontalo) hingga 70,8 (Kalimantan Timur). Ini menunjukkan perbedaan capaian kinerja di berbagai provinsi di kedua pulau ini.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya variasi nilai antar provinsi yang mencerminkan disparitas dalam hal tertentu yang diukur. Provinsi dengan nilai tinggi mungkin memiliki kondisi atau akses yang lebih baik, sementara provinsi dengan nilai rendah memerlukan perhatian lebih dalam hal pembangunan atau intervensi kebijakan untuk meningkatkan aspek yang diukur. Dengan analisis ini, studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi variabel spesifik yang memengaruhi nilai

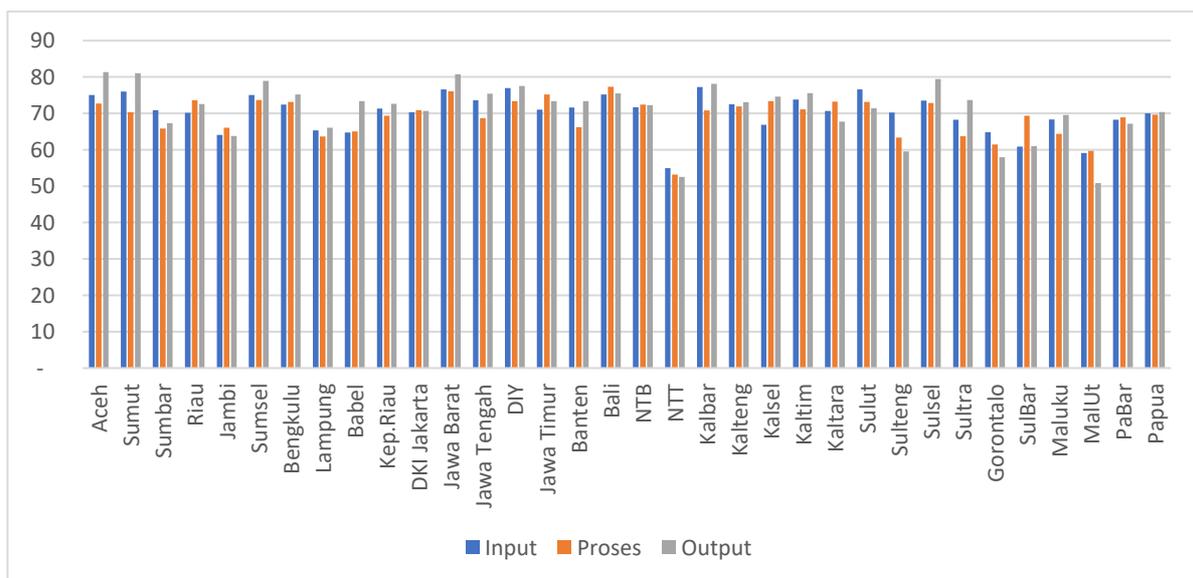
di masing-masing provinsi, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mereduksi kesenjangan.

5.4 Angka Indeks P4GN Tingkat Provinsi Menurut Input-Proses-Output/Outcome

Data ini menunjukkan tiga kategori, yaitu Input, Proses, dan Output/Outcome, untuk setiap provinsi di Indonesia. Berikut adalah analisis dan interpretasi dari data tersebut:

Keseimbangan antara Input, Proses, dan Output/Outcome. Provinsi dengan nilai yang cukup seimbang antara Input, Proses, dan Output/Outcome cenderung memiliki pelaksanaan program yang konsisten. Contohnya adalah Aceh (75,0, 72,7, 81,3), Sumatera Utara (76,0, 70,3, 81,3), dan Jawa Barat (76,6, 76,1, 80,7). Keseimbangan ini mengindikasikan bahwa sumber daya yang dialokasikan (input) dan proses yang dilakukan memberikan hasil yang baik (output/outcome) secara konsisten. Sebaliknya, ada provinsi dengan ketidakseimbangan di antara ketiga kategori ini. Misalnya, Sulawesi Tengah memiliki nilai Input yang cukup (70,2), tetapi nilai Proses (63,3) dan Output/Outcome (59,5) lebih rendah. Hal ini bisa menunjukkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan program atau kendala di lapangan.

Gambar 12. Angka Indeks P4GN Provinsi menurut Input-Proses-Output/Outcome, 2024



Provinsi dengan Output/Outcome Tinggi. Beberapa provinsi memiliki nilai Output/Outcome yang tinggi, misalnya Aceh (81,3), Sumatera Utara (81,0), Sumatera Selatan (78,9), dan Jawa Barat (80,7). Hal ini menunjukkan bahwa upaya di provinsi-

provinsi tersebut menghasilkan dampak yang lebih baik. Namun, untuk provinsi dengan Input dan Proses yang lebih rendah, tingginya nilai Output/Outcome menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan.

Provinsi dengan Input Rendah tetapi Output/Outcome yang Baik. Beberapa provinsi seperti Bangka Belitung (64,8, 65,0, 73,4) dan Sulawesi Tenggara (68,2, 63,7, 73,6) memiliki Input dan Proses yang relatif rendah namun tetap menghasilkan Output/Outcome yang cukup baik. Hal ini dapat menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau strategi yang efektif dalam mengelola proses, meskipun sumber daya yang tersedia terbatas.

Provinsi dengan Tantangan Serius di Semua Aspek. Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara (Malut) memiliki nilai yang rendah di semua kategori: NTT (55,0, 53,2, 52,5) dan Maluku Utara (59,1, 59,7, 50,8). Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi tersebut menghadapi tantangan serius baik dari segi alokasi sumber daya, proses pelaksanaan, maupun hasil. Intervensi tambahan diperlukan untuk meningkatkan kinerja di wilayah-wilayah tersebut.

Provinsi dengan Proses yang Kuat tetapi Output/Outcome yang Rendah. Beberapa provinsi memiliki nilai Proses yang cukup tinggi tetapi Output yang lebih rendah. Misalnya, Kalimantan Utara (70,6, 73,2, 67,8) dan Sulawesi Barat (60,9, 69,4, 61,0). Hal ini bisa menunjukkan adanya kendala atau hambatan yang mengurangi efektivitas dari proses tersebut untuk mencapai output/outcome yang optimal.

Provinsi dengan Potensi untuk Peningkatan Proses. Beberapa provinsi seperti Sumatera Barat (70,9, 65,8, 67,3) dan Banten (71,6, 66,2, 73,4) memiliki nilai Input dan Output/Outcome yang baik tetapi nilai Proses yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan perbaikan dalam aspek proses dan output/outcome di provinsi tersebut bisa meningkat lebih lanjut.

Rata-Rata Nilai di Sekitar 70. Secara keseluruhan, banyak provinsi memiliki nilai di kisaran 70 untuk Input, Proses, dan Output/Outcome. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di berbagai provinsi cukup seragam, dengan beberapa pengecualian yang menonjol baik di sisi tinggi maupun rendah.

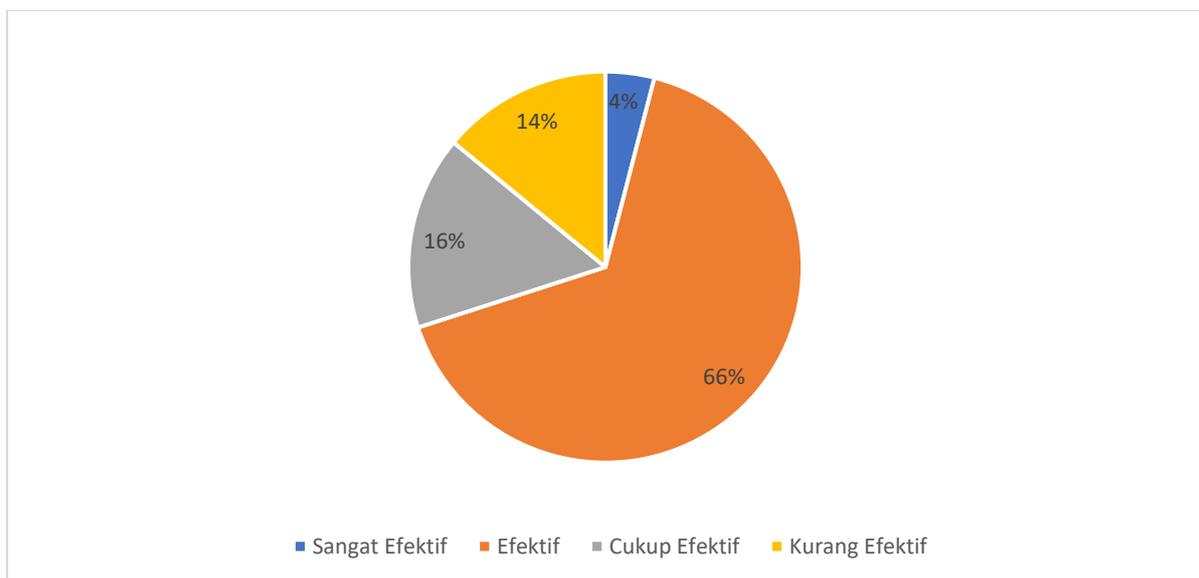
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan variasi kinerja di berbagai provinsi dalam hal alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai. Beberapa provinsi menunjukkan keseimbangan yang baik di ketiga kategori,

sementara yang lain memiliki ketidakseimbangan yang menunjukkan peluang untuk peningkatan di aspek tertentu. Intervensi atau strategi yang lebih spesifik dibutuhkan untuk provinsi dengan nilai rendah, terutama di NTT dan Maluku Utara.

5.5 Kategori Angka Indeks P4GN Tingkat Kabupaten/ Kota

Grafik dibawah ini menunjukkan tingkat efektivitas program atau kebijakan tertentu yang dinilai di berbagai kabupaten/kota, dengan empat kategori: "Sangat Efektif," "Efektif," "Cukup Efektif," dan "Kurang Efektif." Berikut analisis dan interpretasinya:

Gambar 13. Kategori Indeks P4GN Tingkat Kab/Kota, 2024



Distribusi Efektivitas. Mayoritas angka indeks P4GN untuk kabupaten/kota dalam kategori "**Efektif**" (66% kabupaten/kota). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, program ini diterima dengan baik dan dianggap berhasil mencapai tujuannya. Menurut informan dari kedepuyan bidang Pencegahan "BNNK juga menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mencapai target program bidang pencegahan. Mereka melaksanakan program bidang pencegahan di tingkat lokal dengan fokus pada kegiatan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan daerah, termasuk program ketahanan keluarga dan advokasi ketahanan berbasis desa. Melalui kolaborasi antar-tingkatan dan dukungan regulasi yang memadai, kedepuyan bidang pencegahan berhasil menciptakan ekosistem pencegahan yang kuat, mulai dari pusat hingga ke tingkat desa".

Terdapat **16% dari kabupaten/kota** yang memiliki nilai indeks P4GN dalam kategori "**Cukup Efektif**", hal ini menunjukkan bahwa meskipun program P4GN bermanfaat, masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa aspek. Menurut informan dari kedeputian bidang Pemberdayaan Masyarakat "Meskipun terdapat keterbatasan dalam kuantitas SDM yang berfokus pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNNK telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai nilai indeks menuju kategori baik. Upaya ini mencerminkan dedikasi dan komitmen dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing".

Sebanyak **14% dari kabupaten/kota** memiliki nilai indeks P4GN dalam kategori "**Kurang Efektif**", yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi program di daerah tersebut. Menurut informan dari deputi bidang Pemberantasan "Masih ada beberapa daerah yang belum dapat mencapai indeks P4GN secara maksimal. Keterbatasan sumber daya dan dukungan operasional menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba di tingkat lokal. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan semua daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan nasional dalam penanggulangan narkoba".

Hanya **4% dari kabupaten/kota** yang memiliki angka indeks P4GN dalam kategori "**Sangat Efektif**", menunjukkan bahwa sangat sedikit daerah yang mencapai kinerja melebihi ekspektasi atau menunjukkan hasil yang sangat optimal. Menurut informan dari deputi bidang Rehabilitasi "Di tingkat kabupaten/kota, terdapat kemajuan yang sama dalam pencapaian P4GN. Berbagai inisiatif dan program yang dijalankan telah memberikan dampak positif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan akses layanan di tingkat lokal. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu yang membutuhkan rehabilitasi dapat terlayani dengan baik dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dari penyalahgunaan narkoba".

Banyaknya kabupaten/kota yang masuk dalam kategori "Efektif" mengindikasikan bahwa secara umum, program ini dapat diterapkan dengan cukup baik di sebagian besar wilayah. Namun, rendahnya jumlah kabupaten/kota dengan kategori "Sangat Efektif" dan adanya kategori "Kurang Efektif" di beberapa daerah mengindikasikan adanya kendala atau kebutuhan penyesuaian lokal. Faktor-faktor

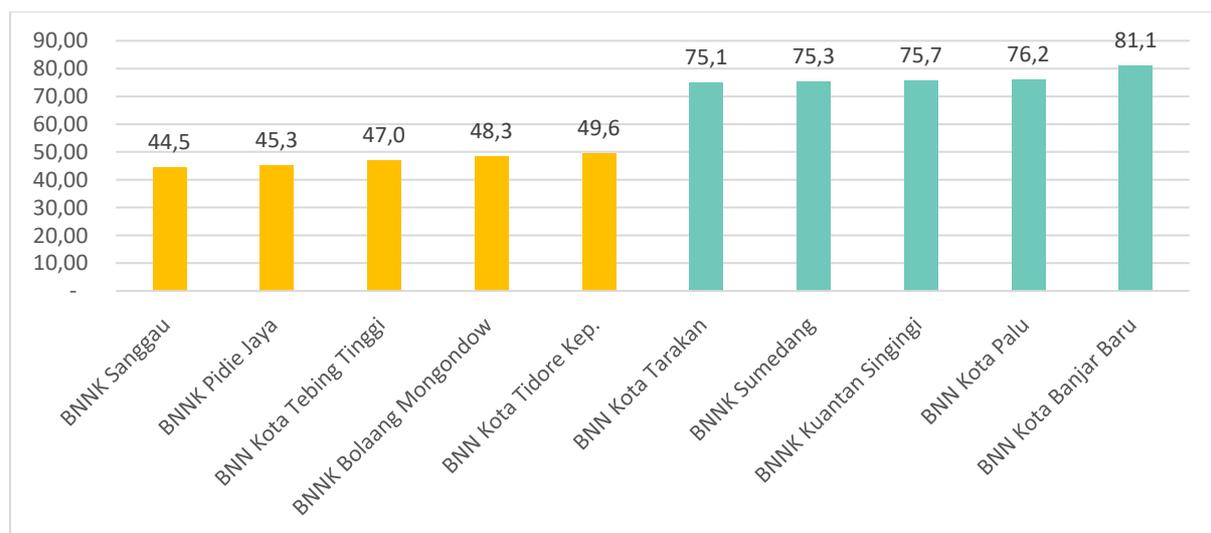
seperti perbedaan sumber daya, tingkat infrastruktur, dan kebutuhan spesifik lokal dapat berkontribusi terhadap variasi penilaian efektivitas.

Meskipun secara keseluruhan program ini cukup berhasil di sebagian besar wilayah (dengan mayoritas kategori "Efektif"), hasil ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam persepsi keberhasilan antara daerah satu dengan lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi di daerah dengan kategori "Kurang Efektif," serta peninjauan aspek apa saja yang berhasil di daerah dengan kategori "Sangat Efektif."

5.6 Angka Indeks P4GN Terendah dan Tertinggi di Tingkat Kabupaten/ Kota

Bagian ini membahas tentang Indeks P4GN yang mewakili kinerja atau capaian BNN Kab/Kota di beberapa wilayah di Indonesia.

Gambar 14. Angka Indeks P4GN 5 Terendah & 5 Tertinggi di Kabupaten/Kota, 2024



Satuan kerja dengan nilai indeks terendah yaitu BNN Kabupaten Sanggau (44,5), sedangkan nilai indeks tertinggi yaitu BNN Kota Banjar Baru (81,1). Berikut ini merupakan analisis dan interpretasi secara lebih rinci.

Berdasarkan distribusi nilainya, dalam laporan ini Indeks P4GN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok lima BNN Kab/Kota dengan nilai terendah dan lima BNN Kab/Kota dengan nilai tertinggi. Kelompok BNN Kab/Kota dengan indeks terendah memiliki rentang nilai 44,5 hingga 49,6. Kelompok ini terdiri dari BNN Kabupaten Sanggau, BNN Kabupaten Pidie Jaya, BNN Kota Tebing Tinggi, BNN Kabupaten Bolaang Mongondow, dan BNN Kota Tidore Kepulauan.

Kelompok kedua terdiri dari lima BNN Kab/Kota dengan indeks tertinggi yang memiliki rentang nilai dari 75,1 hingga 81,1. Kelompok ini terdiri dari BNN Kota Tarakan, BNN Kabupaten Sumedang, BNN Kabupaten Kuantan Singingi, BNN Kota Palu, dan BNN Kota Banjar Baru.

Rata-rata nilai Indeks P4GN secara keseluruhan berkisar pada angka 60, namun dengan adanya dua kelompok ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam pencapaian BNN di berbagai wilayah.

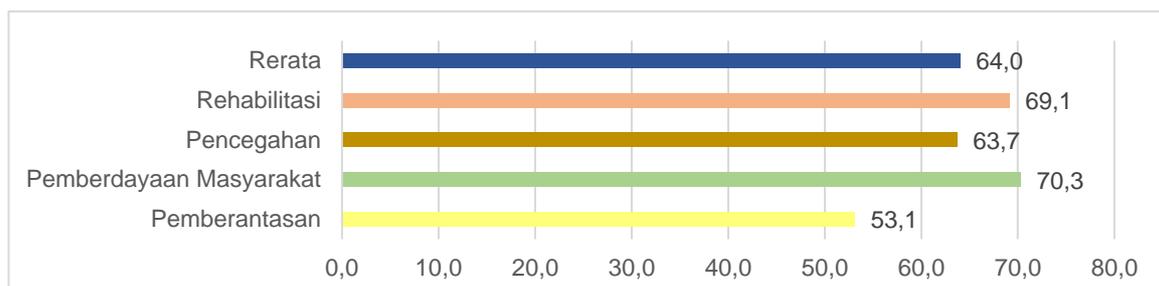
Kabupaten/kota dengan rentang nilai rendah menghadapi tantangan atau hambatan dalam implementasi program P4GN, seperti keterbatasan sumber daya, akses, serta dukungan dari masyarakat setempat. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan kelompok nilai tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian target BNN, disertai dukungan atau kesiapan yang lebih optimal dalam menjalankan program P4GN.

Data ini mengindikasikan adanya disparitas dalam pencapaian kinerja antar wilayah dalam hal pelaksanaan program P4GN oleh BNN Kab/Kota. Wilayah dengan nilai indeks yang rendah perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Wilayah dengan nilai tinggi dapat dijadikan sebagai model atau referensi dalam upaya pengembangan strategi yang lebih efektif di daerah lain.

5.7 Angka Indeks P4GN Kabupaten/ Kota Menurut Kedeputian

Bagian ini membahas tentang Indeks P4GN pada empat bidang utama antara lain Pemberantasan, Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan, dan Rehabilitasi. Total angka indeks keseluruhan (*grand total*) untuk tingkat kabupaten/kota adalah sebesar 64,0. Berikut ini merupakan analisis dan interpretasi secara lebih rinci.

Gambar 15. Angka Indeks P4GN di Kabupaten/Kota Berdasarkan Kedeputian, 2024



Bidang Pemberantasan memiliki angka indeks terendah di antara keempat bidang, yaitu 53,1 dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau keterbatasan dalam pelaksanaan program pemberantasan narkoba di berbagai kabupaten/kota. Rendahnya nilai ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas penegakan hukum, serta hambatan dalam deteksi dini dan penindakan di tingkat lokal.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki angka indeks tertinggi yaitu 70,3 (kategori efektif) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di berbagai kabupaten/kota relatif berjalan dengan baik. Nilai ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta adanya dukungan komunitas yang efektif.

Bidang Pencegahan memiliki nilai sebesar 63,7 (kategori efektif) yang menunjukkan bahwa program pencegahan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Pencegahan biasanya meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun program pencegahan telah diterima dengan baik, namun masih terdapat beberapa daerah yang masih memerlukan pendekatan yang lebih efektif.

Bidang Rehabilitasi menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai sebesar 69,1 (kategori efektif). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kabupaten/kota telah menyediakan layanan rehabilitasi khususnya melalui IBM dengan cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal akses, kualitas layanan, dan dukungan pascarehabilitasi.

Rerata angka indeks keseluruhan di kabupaten/kota adalah sebesar 64,0 (kategori efektif). Angka ini menunjukkan performa kinerja yang cukup baik secara umum dalam pelaksanaan program di empat bidang tersebut. Meskipun demikian, nilai ini juga menandakan bahwa terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan, terutama di Bidang Pemberantasan yang memiliki nilai paling rendah.

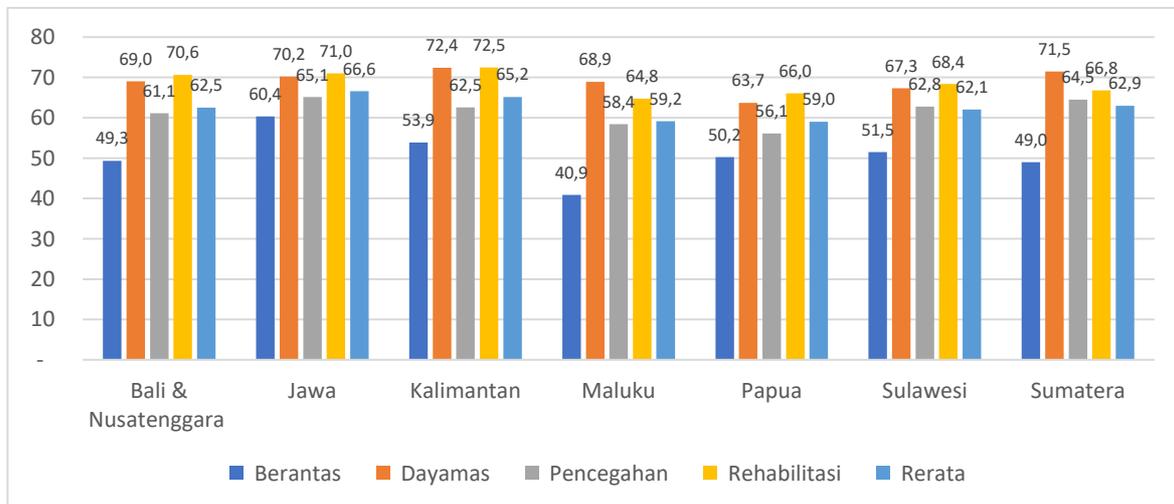
Indeks rerata yang melebihi 60 secara umum menunjukkan program P4GN yang terdiri dari bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang rehabilitasi serta bidang pemberantasan telah berjalan cukup efektif. Namun upaya di bidang pemberantasan narkoba masih tertinggal dibandingkan bidang lainnya,

sehingga memerlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilan program P4GN di masa mendatang.

5.8 Angka Indeks P4GN Kabupaten/ Kota Menurut Kedeputusan & Pulau

Bagian ini menjelaskan angka indeks dari kinerja empat bidang utama program P4GN di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Pemberantasan, Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan, dan Rehabilitasi, serta nilai rerata dari masing-masing wilayah. Berikut ini merupakan analisis dan interpretasi secara lebih rinci berdasarkan wilayah.

Gambar 16. Angka Indeks P4GN menurut Pulau & Kedeputusan di Kabupaten/Kota, 2024



- Nilai tertinggi di wilayah **Bali & Nusa Tenggara** adalah bidang Rehabilitasi (70,6), sementara nilai terendah adalah bidang Pemberantasan (49,3). Nilai rerata 62,5 menunjukkan kinerja wilayah ini efektif, meskipun masih terdapat tantangan pada bidang pemberantasan narkoba yang perlu diperhatikan.
- Wilayah **Jawa** memiliki nilai tertinggi pada bidang Rehabilitasi (71,0) dan Pemberdayaan Masyarakat (70,2), sedangkan nilai terendah adalah bidang Pemberantasan (60,4). Rerata 66,6 menunjukkan kinerja efektif secara keseluruhan, sekaligus yang terbaik di antara seluruh wilayah.
- Nilai untuk wilayah **Kalimantan** menunjukkan bahwa bidang Rehabilitasi memiliki nilai tertinggi (72,5), sedangkan Pemberantasan memiliki nilai yang lebih rendah (53,9). Rerata wilayah ini adalah 65,2, menandakan kinerja yang efektif, dengan beberapa tantangan di bidang pemberantasan.

- d. Wilayah **Maluku** memiliki nilai tertinggi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat (68,9) dan nilai terendah pada bidang Pemberantasan (40,9), yang merupakan nilai pemberantasan terendah di antara semua wilayah. Nilai rerata 59,2 menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kinerja cukup efektif dibandingkan wilayah lain, terutama karena tantangan dalam bidang pemberantasan.
- e. Nilai untuk wilayah **Papua** menunjukkan bahwa bidang Rehabilitasi memiliki nilai tertinggi (66,0), sementara Pemberantasan memiliki nilai terendah (50,2). Rerata 59,0 menunjukkan kinerja yang cukup efektif, dengan tantangan yang signifikan di bidang pemberantasan.
- f. Wilayah **Sulawesi** memiliki nilai tertinggi pada bidang Rehabilitasi (68,4), sedangkan Pemberantasan kembali menunjukkan nilai rendah (51,5). Rerata wilayah ini adalah 62,1, menunjukkan kinerja yang efektif, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama di bidang pemberantasan.
- g. Wilayah **Sumatera** memiliki nilai tertinggi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat (71,5), sedangkan nilai terendah terdapat pada bidang Pemberantasan (49,0). Dengan rerata 62,9, Sumatera menunjukkan kinerja yang efektif, namun menghadapi tantangan dalam bidang pemberantasan.

Selain analisis berdasarkan wilayah, berikut ini merupakan analisis dan interpretasi secara lebih rinci berdasarkan bidang.

Nilai di bidang **Pemberantasan** secara konsisten rendah di seluruh wilayah, dengan nilai terendah di Maluku (40,9) dan tertinggi di Jawa (60,4). Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba adalah bidang yang paling menantang di seluruh wilayah yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, geografis, atau kendala dalam penegakan hukum.

Pemberdayaan Masyarakat adalah bidang yang mendapatkan nilai tinggi hampir di semua wilayah, terutama di Kalimantan (72,4) dan Sumatera (71,5). Nilai tinggi ini menunjukkan keberhasilan dalam melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi adalah bidang yang secara konsisten mendapatkan nilai tinggi di seluruh wilayah, dengan nilai tertinggi di Kalimantan (72,5) serta Bali dan Nusa Tenggara (70,6). Hal ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berjalan cukup baik,

namun wilayah-wilayah dengan akses layanan yang terbatas masih membutuhkan dukungan tambahan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

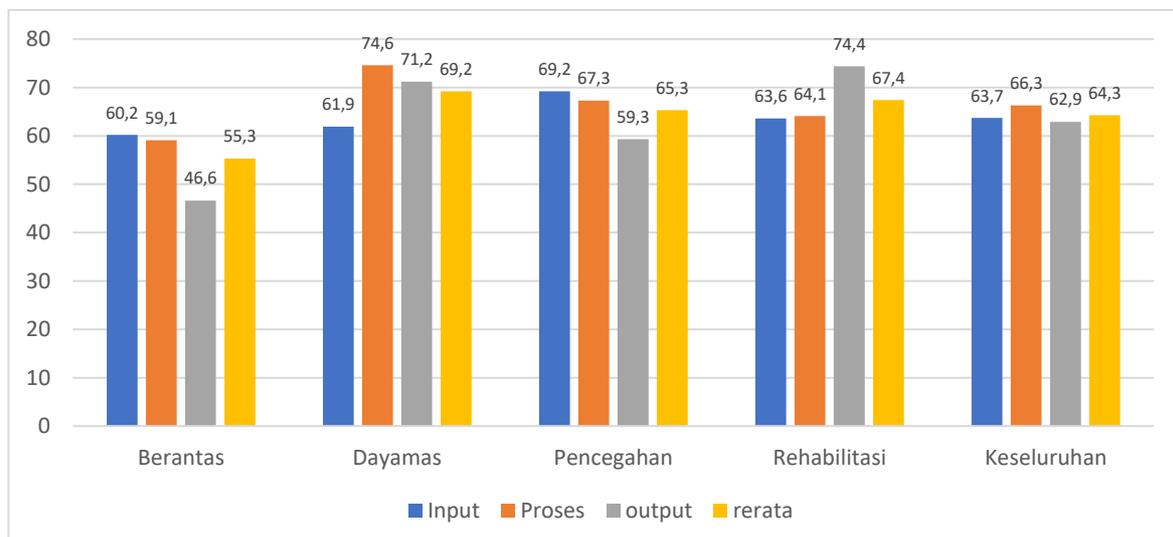
Bidang **Pencegahan** juga menunjukkan performa yang cukup baik, dengan nilai tertinggi di Jawa (65,1) dan nilai terendah di Maluku dan Papua (56,1). Hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan telah diterima dengan cukup baik, di antaranya melalui pendekatan berbasis pendidikan dan penyuluhan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Data ini mengindikasikan adanya variasi dalam efektivitas pelaksanaan program BNN di berbagai wilayah, dengan bidang pemberantasan narkoba yang cenderung memiliki nilai rendah secara konsisten. Sebaliknya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Rehabilitasi menunjukkan performa tinggi di hampir semua wilayah, yang menandakan keberhasilan dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-programnya.

5.9 Angka Indeks P4GN Kabupaten/ Kota Berdasarkan Input-Proses-Output/Outcome (IPO)

Data ini memberikan gambaran mengenai angka indeks pada tiga aspek utama Input, Proses, dan Output/Outcome – untuk empat bidang program yaitu Berantas, Pemberdayaan Masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat), Pencegahan, dan Rehabilitasi, serta nilai rerata keseluruhan untuk setiap bidang. Berikut analisis dan interpretasinya:

Gambar 17. Angka Indeks P4GN di Kab/Kota menurut Kedeputian & IPO, 2024



Analisis Kinerja Setiap Bidang

Pemberantasan. Input: Angka indeks input sebesar 60,2 menunjukkan bahwa sumber daya atau upaya awal untuk pemberantasan cukup baik, namun tidak optimal. **Proses:** Nilai proses sebesar 59,1 menunjukkan bahwa efektivitas tahapan implementasi pemberantasan sedikit lebih rendah dari input, menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan operasional. **Output/Outcome:** Nilai output/outcome sebesar 46,6 adalah yang terendah di antara seluruh bidang, menunjukkan hasil akhir yang kurang memuaskan, yang bisa jadi mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam mencapai target pemberantasan. **Rerata:** Rata-rata 55,3 menunjukkan bahwa bidang pemberantasan masih menghadapi tantangan serius dalam keseluruhan proses, terutama pada tahap output/outcome, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pemberdayaan Masyarakat. Input: Nilai input sebesar 61,9 menunjukkan investasi awal yang baik dalam pemberdayaan masyarakat. **Proses:** Nilai proses sebesar 74,6 adalah yang tertinggi di antara semua bidang, yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. **Output/Outcome:** Nilai output/outcome sebesar 71,2 juga menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat menghasilkan dampak yang positif dan signifikan. **Rerata:** Dengan rerata 69,2, Pemberdayaan Masyarakat adalah bidang dengan kinerja tertinggi di antara semua bidang, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam melibatkan masyarakat untuk tujuan pencegahan narkoba.

Pencegahan. Input: Nilai input sebesar 69,2 merupakan yang tertinggi pada aspek input di antara semua bidang, menandakan adanya sumber daya atau upaya awal yang signifikan untuk pencegahan. **Proses:** Nilai proses sebesar 67,3 menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik. **Output/Outcome:** Nilai output sebesar 59,3 menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi kurang maksimal, sehingga masih ada ruang untuk perbaikan dalam efektivitas akhir program pencegahan. **Rerata:** Rerata 65,3 menunjukkan bahwa bidang pencegahan secara keseluruhan memiliki kinerja yang efektif, terutama dengan dukungan kuat pada tahap input.

Rehabilitasi. Input: Nilai input sebesar 63,6 menunjukkan sumber daya yang cukup baik dalam program rehabilitasi. **Proses:** Nilai proses sebesar 64,1 menunjukkan efektivitas pelaksanaan yang relatif stabil. **Output/Outcome:** Nilai

output/outcome sebesar 74.4 adalah yang tertinggi di antara seluruh bidang, menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dari layanan rehabilitasi yang diberikan dengan memaksimalkan input dan proses yang ada. **Rerata:** Rerata 67.4 menunjukkan kinerja yang efektif, khususnya pada tahap output, yang menandakan bahwa program rehabilitasi memiliki dampak positif yang kuat dalam mendukung pemulihan pengguna narkoba.

Keseluruhan. Input: Nilai keseluruhan input sebesar 63,7 menunjukkan investasi awal yang baik pada semua bidang. **Proses:** Nilai proses keseluruhan sebesar 66,3 menunjukkan pelaksanaan yang baik secara umum di seluruh bidang. **Output/Outcome:** Nilai output/outcome keseluruhan sebesar 62,9 menunjukkan hasil akhir yang positif namun masih membutuhkan peningkatan, terutama di bidang pemberantasan. **Rerata:** Rerata keseluruhan sebesar 64,3 menunjukkan kinerja yang efektif, namun terdapat bidang-bidang tertentu yang memerlukan perbaikan, terutama dalam mencapai hasil yang optimal.

Data menunjukkan bahwa bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi memiliki kinerja yang paling baik, terutama pada tahap proses dan output/outcome. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Namun, bidang pemberantasan memiliki tantangan besar, terutama dalam hal hasil akhir (output/outcome), yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih efektif dan peningkatan kapasitas operasional.

BAB 6

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI P4GN

6.1 Tantangan

Badan Narkotika Nasional baik dari pusat sampai Kab/kota menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan program P4GN yang mencakup beberapa aspek yang kompleks. Keterlibatan masyarakat dalam program P4GN sudah cukup baik namun masih perlu di tingkatkan. Salah satu kendala yang menghambat keterlibatan masyarakat adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan P4GN. Hal ini terjadi karena isu narkoba seringkali tidak dipandang sebagai prioritas dalam kebijakan daerah, sehingga banyak pemerintah daerah yang belum mengeluarkan regulasi khusus untuk mendukung upaya P4GN. Pemerintah daerah sering menganggap bahwa permasalahan narkoba adalah tanggung jawab utama BNN, sehingga kolaborasi dan dukungan regulasi menjadi kurang maksimal.

Di samping itu, kerja sama lintas sektor, khususnya dengan sektor swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), juga belum optimal. Hanya sebagian kecil daerah yang mendapatkan dana CSR untuk mendukung kegiatan atau program P4GN, yang menandakan adanya peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana juga menjadi tantangan utama, terutama pada deputi bidang pemberantasan. Jumlah BNN Kab/kota yang ada saat ini belum memadai untuk mengatasi luasnya wilayah geografis yang mereka tangani, sehingga beberapa BNN Kab/kota dengan cakupan wilayah yang luas dan sulit dijangkau mengalami kendala yang cukup signifikan.

Selain itu, banyak SDM di setiap deputi yang harus mengerjakan tugas di luar fungsi pokoknya. Pada deputi bidang rehabilitasi, misalnya, kurangnya tenaga kesehatan, terutama dokter, menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Demikian juga di deputi bidang pemberantasan, keterbatasan tenaga penyidik serta anggaran untuk penyidikan dan kegiatan intelijen menghambat upaya pengungkapan kasus.

Dari sisi administrasi, proses pelaporan dan pencatatan belum sepenuhnya tersistem dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus bagi petugas input data, yang umumnya berasal dari bagian umum dan belum memahami sepenuhnya kegiatan operasional. Tantangan lainnya adalah adanya tumpang tindih dalam proses input data antara Sistem Informasi Narkoba (SIN) dengan aplikasi lain di setiap satuan kerja.

6.2 Strategi

Berdasarkan tantangan-tantangan yang diidentifikasi, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah

- Sosialisasi intensif kepada pemangku kebijakan di tingkat daerah mengenai pentingnya isu narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi.
- Pendekatan melalui regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mendukung P4GN melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas.

2. Optimalisasi Kerja Sama Lintas Sektor

- Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR dengan membuat proposal kemitraan yang menunjukkan manfaat sosial dari dukungan CSR terhadap program P4GN.
- Mengadakan forum atau lokakarya yang melibatkan sektor swasta untuk berdiskusi membahas kontribusi mereka dalam mendukung P4GN, serta menunjukkan contoh daerah yang telah berhasil memanfaatkan dana CSR.

3. Penguatan SDM dan Infrastruktur.

- Melakukan perekrutan tambahan SDM, khususnya di daerah dengan cakupan geografis yang luas dan sulit dijangkau.
- Melatih SDM yang ada agar dapat menangani berbagai tugas lintas deputi dengan efektif, serta menambah tenaga khusus seperti tenaga kesehatan untuk rehabilitasi dan penyidik untuk pemberantasan.

4. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Pencatatan.

- Standarisasi pelatihan untuk petugas input data agar memiliki pemahaman mendalam terkait kegiatan yang diinput, khususnya dalam Sistem Informasi Narkoba (SIN).
- Menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem pelaporan untuk menghindari tumpang tindih data antara SIN dan aplikasi lain, dengan melibatkan tim teknologi informasi untuk melakukan sinkronisasi data di setiap satuan kerja.

5. Optimalisasi Anggaran

- Mengajukan tambahan anggaran khusus untuk mendukung operasional deputi bidang pemberantasan, terutama untuk penyidikan dan kegiatan intelijen.
- Memanfaatkan alokasi dana secara lebih efisien dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung pada upaya pemberantasan dan rehabilitasi.

Dengan penerapan strategi-strategi ini, diharapkan efektivitas program P4GN dapat ditingkatkan, mendukung keberhasilan program ditingkat daerah, dan memperkuat dampak positif upaya anti narkoba di masyarakat.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Temuan penelitian ini menyoroti perkembangan Indeks P4GN sebagai ukuran kinerja program P4GN. Indeks ini menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2024 di semua tingkat, terutama di tingkat pusat dan nasional. Peningkatan indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan yang diterapkan, meskipun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara tingkat pusat dan kabupaten/kota.

Dari analisis Indeks P4GN, terlihat bahwa pada tingkat kabupaten/kota, indeks meningkat dari 52 pada tahun 2021 menjadi 64 pada tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan kinerja di tingkat lokal meski dihadapkan pada berbagai tantangan. Di tingkat provinsi, indeks naik dari 56 menjadi 70, sementara tingkat pusat mengalami peningkatan tajam dari 55 menjadi 81.

Perbandingan antar-tingkat menunjukkan bahwa kabupaten/kota, yang sebelumnya berada di bawah provinsi dan pusat, mulai mencatat kemajuan signifikan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberhasilan implementasi program di tingkat lokal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan dan keseragaman hasil di seluruh wilayah Indonesia.

BNN masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjalankan program P4GN, di antaranya:

a. **Kurangnya Komitmen Daerah.**

Banyak pemerintah daerah belum mengintegrasikan isu narkoba ke dalam kebijakan mereka, yang menyebabkan regulasi lemah dan alokasi anggaran yang tidak memadai.

b. **Keterbatasan Sumber Daya.**

Terbatasnya jumlah SDM dan infrastruktur di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, menghambat pelaksanaan program.

7.2 Saran

Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka strategi yang disarankan adalah:

a. **Penguatan Komitmen Daerah**

- Mengintensifkan sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah.
 - Mengembangkan kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif daerah dalam program P4GN.
- b. Kerja Sama Lintas Sektor**
- Membentuk forum kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk berbagi praktik terbaik.
 - Mengoptimalkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program P4GN.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur**
- Merekrut tenaga kerja di daerah yang kekurangan SDM, terutama di wilayah timur Indonesia.
 - Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis SDM di bidang rehabilitasi, pemberantasan, dan pengelolaan program.
- d. Optimalisasi Infrastruktur Rehabilitasi**
- Meningkatkan fasilitas rehabilitasi di daerah dengan indeks rendah, seperti Maluku.
 - Mendorong pengembangan program rehabilitasi berbasis komunitas.
- e. Pendekatan Berbasis Data**
- Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi untuk mempermudah akses data.
 - Melakukan analisis berkala terhadap kinerja program berdasarkan data P4GN.
- f. Advokasi dan Penyuluhan**
- Menyelenggarakan kampanye edukasi yang luas mengenai bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi.
 - Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan.
- g. Penguatan Pemberantasan**
- Memperkuat kerja sama dengan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas operasi pemberantasan narkoba.

- Memanfaatkan teknologi modern untuk pelacakan dan pengungkapan jaringan narkoba.

h. Penguatan Regulasi

- Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan permasalahan narkoba, seperti pengelolaan New Psychoactive Substances (NPS) dan pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
- Mengawal penyusunan regulasi di daerah untuk memastikan pelaksanaan P4GN yang optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, BNN telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Melalui pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis data, BNN terus berupaya membangun ketahanan masyarakat terhadap narkoba. Namun, tantangan, terutama di tingkat kabupaten/kota, masih memerlukan perhatian khusus. Dengan strategi yang tepat, diharapkan program P4GN dapat berjalan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional**



Augustinus B. Pangaribuan, S.I.K., M.Si.

Daftar Pustaka

- BNN RI, Biro Perencanaan Sekretariat Utama. Struktur Kinerja Penanganan Permasalahan Narkoba. 2023. *Power Point Presentation*.
- BNN RI, BNNP dan BNNK. Hasil FGD Validasi Data Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Sosialisasi tentang Data dan Informasi 30 Okt s/d 1 Nov tahun 2023. 2023.
- BNN RI, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2022.
- BNN RI, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. LKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 2022
- BNN RI, Deputi Bidang Pemberantasan. Anev Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022.
- BNN RI, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Akhir Tahun. 2022.
- BNN RI, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2022.
- BNN RI, Deputi Bidang Pencegahan. Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara) Direktorat Advokasi. 2022.
- BNN RI, Deputi Bidang Pencegahan. Sistem Informasi Deputi Bidang Pencegahan (SIDEPE). 2022.
- BNN RI, Deputi Bidang Rehabilitasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi. Tahun 2022.
- BNN RI, Direktorat Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kerja Sama Tahun 2022. Tahun 2023.
- BNN RI, Direktorat Kerja Sama, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kerja Sama Tahun 2022. Tahun 2023.
- BNN RI, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi. LAKIP. 2022.
- BNN RI. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- BNN RI. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024.
- BNN RI. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- BNN RI, Pusat Pengembangan SDM (PPSDM). Capaian Kinerja PPSDM Tahun 2022 per 31 Desember. 2022.
- BNN RI, Pusat Penelitian, Data dan Informasi. LKIP Puslitdatin BNN. 2022.
- BNN RI. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional. 2023.

LAMPIRAN

Tabel 1. Tren Angka Indeks P4GN menurut Jenjang, 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Kab/Kota	52	54	63	64
Provinsi	56	57	66	70
Pusat	55	55	78	81
Nasional	55	55	64	65

Tabel 2. Angka Indeks P4GN menurut Kedepuitan dan jenjang, 2024

Deskripsi	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Hukum dan Kerja Sama	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
Kab_Kota	53.1	70.3		63.7	69.1	64.0
Provinsi	66.9	73.6		65.4	74.9	70.2
Pusat	85.5	84.2	78.2	73.3	82.4	80.7
Nasional	55.4	70.9	78.2	64.0	70.1	65.1

Tabel 3. Angka Indeks P4GN menurut Kedepuitan & Pulau, 2024

Deskripsi	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
Bali & Nusa Tenggara	51.7	70.2	63.3	68.4	63.2
Jawa	62.0	70.3	65.5	72.0	67.4
Kalimantan	56.7	73.0	63.6	73.5	66.6
Maluku	46.3	70.0	59.4	61.8	59.8
Papua	51.4	70.9	61.7	72.0	64.0
Pusat	85.5	84.2	73.3	82.4	81.3
Sulawesi	54.0	68.1	62.1	69.8	63.3
Sumatera	51.6	71.9	64.4	68.5	64.1
Nasional	55.4	70.9	64.0	70.1	65.1

Tabel 4. Angka Indeks P4GN menurut 7 Daerah Prioritas BNN, 2024

Row Labels	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
No	65.4	73.4	64.3	73.8	69.3
Yes	72.7	74.3	69.4	78.8	73.8
Grand Total	66.9	73.6	65.4	74.9	70.2

Tabel 5. Angka Bobot Indeks P4GN menurut Input-Proses_Output & jenjang, 2024

Row Labels	Input_bbt	Proses_bb	Output_bb	Indeks P4GN
Kab_Kota	12.7	19.9	31.4	64.0
Provinsi	14.0	20.7	35.4	70.2
Pusat	14.8	24.7	41.2	80.7
Grand Total	13.0	20.0	32.1	65.1

Tabel 6. Angka Bobot Indeks P4GN menurut Input-Proses_Output menurut Kedeputan & jenjang, 2024

Row Labels	Input_bbt	Proses_bb	Output_bb	Indeks P4GN
Berantas	12.3	18.3	24.8	55.4
Kab_Kota	12.0	17.7	23.3	53.1
Provinsi	13.7	21.1	32.1	66.9
Pusat	16.5	24.5	44.5	85.5
Pemberdayaan Masyarakat	12.9	22.5	35.6	70.9
Kab_Kota	12.4	22.4	35.6	70.3
Provinsi	15.2	22.8	35.6	73.6
Pusat	15.8	25.4	43.0	84.2
Hukum dan Kerja Sama	13.2	25.6	39.4	78.2
Kab_Kota				

Provinsi				
Pusat	13.2	25.6	39.4	78.2
Pencegahan	13.8	20.0	30.2	64.0
Kab_Kota	13.8	20.2	29.7	63.7
Provinsi	13.4	19.1	32.9	65.4
Pusat	14.2	21.0	38.2	73.3
Rehabilitasi	12.9	19.4	37.9	70.1
Kab_Kota	12.7	19.2	37.2	69.1
Provinsi	13.8	19.9	41.1	74.9
Pusat	14.5	26.8	41.1	82.4
Grand Total	13.0	20.0	32.1	65.1

Tabel 7. Angka Indeks P4GN Provinsi menurut Kedeputan & Provinsi, 2024

Provinsi	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
11. Aceh	50.4	75.7	67.3	64.2	64.6
12. Sumatera Utara	57.0	71.5	63.5	66.5	64.6
13. Sumatera Barat	58.9	74.0	70.5	70.2	68.4
14. Riau	59.6	70.5	71.1	74.6	69.0
15. Jambi	58.6	70.7	65.8	72.3	66.9
16. Sumatera Selatan	53.2	70.2	64.2	63.1	62.4
17. Bengkulu	49.1	77.5	68.2	74.7	69.0
18. Lampung	48.2	68.4	50.2	74.5	60.9
19. Bangka Belitung	42.7	74.3	55.7	71.9	61.1
21. Kep.Riau	19.4	64.8	72.3	68.0	56.1
31. DKI Jakarta	56.8	68.8	57.5	79.8	65.7

32. Jawa Barat	61.2	74.2	68.4	70.9	68.5
33. Jawa Tengah	59.7	70.6	71.1	70.7	68.0
34. DIY	66.7	65.3	72.4	79.8	71.0
35. Jawa Timur	64.6	68.5	61.3	69.4	66.0
36. Banten	58.7	70.5	59.6	75.6	66.1
51. Bali	63.8	67.3	58.1	70.4	64.9
52. NTB	44.4	74.3	67.8	74.9	65.4
53. NTT	42.2	70.3	66.9	56.7	58.0
61. Kalimantan Barat	41.6	71.4	56.3	71.8	60.3
62. Kalimantan Tengah	56.3	67.2	70.4	75.9	67.4
63. Kalimantan Selatan	58.3	75.0	67.9	73.3	68.6
64. Kalimantan Timur'	73.0	78.5	59.6	71.1	70.8
65. Kalimantan Utara	60.0	71.8	68.3	79.6	69.9
71. Sulawesi Utara	58.8	61.6	46.5	70.5	59.3
72. Sulawesi Tengah	55.6	74.0	62.2	60.5	62.8
73. Sulawesi Selatan	61.6	71.4	68.5	77.2	69.4
74. Sulawesi Tenggara	60.4	69.1	66.4	76.0	67.6
75. Gorontalo	34.7	60.0	64.1	70.3	57.3
76. Sulawesi Barat	52.6	76.1	70.9	69.4	67.3
81. Maluku	46.1	68.5	63.4	71.2	62.3
82. Maluku Utara	46.4	71.2	56.4	54.7	57.9
91. Papua Barat	48.4	84.3	61.3	77.8	67.9
92. Papua	52.4	66.5	61.8	70.1	62.7
Provinsi keseluruhan	66.9	73.6	65.4	74.9	70.2

Tabel 8. Angka Indeks Provinsi menurut Input-Proses-Output/Outcome

Row Labels	Average of ok_Input	Average of ok_Proses	Average of ok_Output
11. Aceh	75,0	72,7	81,3
12. Sumatera Utara	76,0	70,3	81,0
13. Sumatera Barat	70,9	65,8	67,3
14. Riau	70,2	73,6	72,6
15. Jambi	64,1	66,1	63,8
16. Sumatera Selatan	75,1	73,7	78,9
17. Bengkulu	72,4	73,2	75,2
18. Lampung	65,4	63,6	66,1
19. Bangka Belitung	64,8	65,0	73,4
21. Kep.Riau	71,3	69,4	72,6
31. DKI Jakarta	70,3	70,9	70,6
32. Jawa Barat	76,6	76,1	80,7
33. Jawa Tengah	73,6	68,7	75,5
34. DIY	77,0	73,4	77,6
35. Jawa Timur	71,0	75,2	73,4
36. Banten	71,6	66,2	73,4
51. Bali	75,2	77,3	75,5
52. NTB	71,7	72,4	72,3
53. NTT	55,0	53,2	52,5
61. Kalimantan Barat	77,3	70,8	78,1
62. Kalimantan Tengah	72,5	71,9	73,1
63. Kalimantan Selatan	66,9	73,4	74,6

64. Kalimantan Timur'	73,9	71,1	75,6
65. Kalimantan Utara	70,6	73,2	67,8
71. Sulawesi Utara	76,6	73,1	71,4
72. Sulawesi Tengah	70,2	63,3	59,5
73. Sulawesi Selatan	73,5	72,9	79,4
74. Sulawesi Tenggara	68,2	63,7	73,6
75. Gorontalo	64,8	61,5	57,9
76. Sulawesi Barat	60,9	69,4	61,0
81. Maluku	68,3	64,4	69,6
82. Maluku Utara	59,1	59,7	50,8
91. Papua Barat	68,3	68,9	67,2
92. Papua	70,0	69,6	70,4
Grand Total	70,1	69,1	70,9

Tabel 9. Angka Indeks P4GN menurut Kedeputian dan Kepulauan di tingkat Provinsi, 2024

Row Labels	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
Bali & Nusatenggara	59.5	75.5	72.7	58.7	66.1
Jawa	75.7	71.5	68.2	79.8	73.8
Kalimantan	70.2	75.7	68.1	77.9	73.0
Maluku	57.1	72.8	61.8	54.2	61.5
Papua	52.6	78.1	67.2	78.0	69.0
Sulawesi	65.2	71.0	59.5	75.6	67.9
Sumatera	68.9	74.3	64.1	78.3	71.5
Total	66.9	73.6	65.4	74.9	70.2

Tabel 10. Angka Indeks P4GN menurut Kedeputian dan Kepulauan di tingkat Kab-Kota, 2024

Row Labels	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
Bali & Nusatenggara	49.3	69.0	61.1	70.6	62.5
Jawa	60.4	70.2	65.1	71.0	66.6
Kalimantan	53.9	72.4	62.5	72.5	65.2
Maluku	40.9	68.9	58.4	64.8	59.2
Papua	50.2	63.7	56.1	66.0	59.0
Sulawesi	51.5	67.3	62.8	68.4	62.1
Sumatera	49.0	71.5	64.5	66.8	62.9
Total	53.1	70.3	63.7	69.1	64.0

Tabel 11. Angka Indeks P4GN kedepuitan dan kab/kota, 2024

Provinsi	Kab/Kota	Berantas	Pemberdayaan Masyarakat	Pencegahan	Rehabilitasi	Keseluruhan
11. Aceh	1101. BNNK Aceh Selatan	31.2	73.5	57.1	66.6	57.1
11. Aceh	1171. BNN Kota Banda Aceh	40.1	78.1	71.6	71.1	65.2
11. Aceh	1110. BNNK Bireun	62.2	87.6	69.9	56.1	68.9
11. Aceh	1118. BNNK Pidie Jaya	47.8	63.8	46.9	22.5	45.3
11. Aceh	1113. BNNK Gayo Lues	40.9	84.8	69.9	75.7	67.8
11. Aceh	1114. BNNK Aceh Tamiang	53.2	67.2	65.8	68.4	63.6
11. Aceh	1110. BNNK Pidie	44.4	71.3	75.8	74.3	67.4
11. Aceh	1173. BNN Kota Langsa	53.5	77.2	77.4	64.3	68.1
11. Aceh	1174. BNN Kota Lhokseumawe	74.3	73.9	71.0	67.0	71.5
11. Aceh	1172. BNN Kota Sabang	28.1	74.2	69.3	59.8	57.8
12. Sumatera Utara	1212. BNNK Deli Serdang	47.3	67.9	72.9	72.6	65.2
12. Sumatera Utara	1213. BNNK Langkat	41.5	74.3	63.0	67.0	61.4
12. Sumatera Utara	1208. BNNK Asahan	66.9	78.0	55.6	71.2	67.9
12. Sumatera Utara	1202. BNNK Mandailing Natal	45.9	78.1	52.8	69.4	61.5

12. Sumatera Utara	1203. BNNK Tapanuli Selatan	43.1	72.5	58.4	63.4	59.3
12. Sumatera Utara	1211. BNNK Karo	63.8	61.1	58.1	69.8	63.2
12. Sumatera Utara	1219. BNNK Batu Bara	58.9	65.2	76.7	75.9	69.2
12. Sumatera Utara	1223. BNNK Labuhanbatu Utara	57.3	75.8	64.6	46.7	61.1
12. Sumatera Utara	1209. BNNK Simalungun	56.6	73.5	51.8	67.5	62.3
12. Sumatera Utara	1273. BNN Kota Pematang Siantar	56.0	68.6	66.7	77.1	67.1
12. Sumatera Utara	1272. BNN Kota Tanjung Balai	48.2	72.8	68.2	70.6	65.0
12. Sumatera Utara	1276. BNN Kota Binjai	56.8	73.8	67.5	71.4	67.4
12. Sumatera Utara	1278. BNN Kota Gunungsitoli	67.3	74.7	74.3	72.8	72.3
12. Sumatera Utara	1274. BNN Kota Tebing Tinggi	62.1	57.9	45.8	22.1	47.0
12. Sumatera Utara	1218. BNNK Serdang Bedagai	54.9	76.3	70.9	67.8	67.5
13. Sumatera Barat	1376. BNN Kota Payakumbuh	56.4	82.6	72.5	62.9	68.6
13. Sumatera Barat	1373. BNN Kota Sawahlunto	66.4	69.6	75.2	74.2	71.4
13. Sumatera Barat	1372. BNNK Solok	54.8	75.8	74.2	71.2	69.0
13. Sumatera Barat	1312. BNNK Pasaman Barat	59.8	70.0	63.3	69.0	65.5

14. Riau	1401. BNNK Kuantan Singingi	70.1	78.5	74.7	79.6	75.7
14. Riau	1404. BNNK Pelalawan	55.7	65.1	75.7	72.2	67.2
14. Riau	1471. BNN Kota Pekanbaru	58.5	61.6	51.8	72.1	61.0
14. Riau	1473. BNN Kota Dumai	48.4	84.3	76.6	64.5	68.5
15. Jambi	1571. BNN Kota Jambi	56.1	71.3	74.5	66.4	67.1
15. Jambi	1504. BNNK Batanghari	62.1	74.1	81.9	69.9	72.0
15. Jambi	1507. BNNK Tanjung Jabung Timur	58.4	70.1	58.2	68.7	63.8
16. Sumatera Selatan	1673. BNN Kota Pagar Alam	52.9	73.3	58.7	66.3	62.8
16. Sumatera Selatan	1672. BNN Kota Prabumulih	68.0	66.2	66.7	54.4	63.8
16. Sumatera Selatan	1611. BNNK Empat Lawang	46.8	74.3	66.5	18.8	51.6
16. Sumatera Selatan	1610. BNNK Ogan Ilir	29.0	64.3	64.3	64.1	55.4
16. Sumatera Selatan	1603. BNNK Muara Enim	53.2	81.9	80.2	73.2	72.1
16. Sumatera Selatan	1605. BNNK Musi Rawas	47.2	51.2	58.3	77.5	58.5
16. Sumatera Selatan	1602. BNNK Ogan Komering Ilir	58.4	71.2	48.6	67.8	60.9
16. Sumatera Selatan	1609. BNNK Ogan Komering Ulu Timur	49.7	54.9	64.6	57.3	56.6

16. Sumatera Selatan	1674. BNN Kota Lubuk Linggau	47.8	76.2	67.7	73.5	66.3
17. Bengkulu	1701. BNN Kab Bengkulu Selatan	44.6	79.5	67.1	71.3	65.9
17. Bengkulu	1771. BNN Kota Bengkulu	53.5	74.7	73.9	73.7	69.0
18. Lampung	1803. BNNK Lampung Selatan	33.9	71.3	34.8	80.4	60.2
18. Lampung	1802. BNNK Tanggamus	42.3	64.4	61.1	78.3	61.5
18. Lampung	1804. BNNK Lampung Timur	42.2	65.1	29.4	71.8	52.1
18. Lampung	1807. BNNK Way Kanan	51.2	75.0	60.9	68.3	63.8
18. Lampung	1872. BNN Kota Metro	48.6	63.7	63.5	75.5	62.8
19. Bangka Belitung	1905. BNNK Bangka Selatan	31.1	71.3	32.6	69.7	51.2
19. Bangka Belitung	1971. BNN Kota Pangkalpinang	37.8	65.0	40.5	60.0	50.8
19. Bangka Belitung	1902. BNNK Belitung	47.1	80.6	74.3	75.0	69.3
19. Bangka Belitung	1901. BNNK Bangka	45.2	73.4	67.4	74.8	65.2
21. Kep.Riau	2172. BNN Kota Tanjung Pinang		66.5	75.4	70.5	70.8
21. Kep.Riau	2101. BNN Kabupaten Karimun		66.0	73.9	59.8	66.6
21. Kep.Riau	2171. BNN Kota Batam		62.7	72.5	65.2	66.8

31. DKI Jakarta	3171. BNN Kota Jakarta Selatan	57.6	75.8	53.5	75.5	65.6
31. DKI Jakarta	3172. BNN Kota Jakarta Timur	54.3	73.7	53.5	77.5	64.7
31. DKI Jakarta	3175. BNN Kota Jakarta Utara	49.8	55.2	59.4	83.3	61.9
32. Jawa Barat	3276. BNN Kota Depok	65.6	78.2	73.6	69.4	70.5
32. Jawa Barat	3205. BNNK Garut	69.8	66.2	69.3	61.1	66.6
32. Jawa Barat	3207. BNNK Ciamis	59.1	78.2	71.2	70.0	69.6
32. Jawa Barat	3215. BNNK Karawang	63.2	72.8	76.8	69.8	70.6
32. Jawa Barat	3209. BNN Kota Cirebon	59.6	76.6	77.2	71.1	71.1
32. Jawa Barat	3271. BNNK Bogor	68.2	72.1	83.4	74.8	74.6
32. Jawa Barat	3277. BNN Kota Cimahi	65.9	78.3	78.4	72.0	73.6
32. Jawa Barat	3273. BNN Kota Bandung	48.3	66.4	51.4	72.1	57.9
32. Jawa Barat	3203. BNNK Cianjur	54.8	76.3	45.9	76.2	63.3
32. Jawa Barat	3202. BNNK Sukabumi	53.2	65.7	73.8	61.7	63.6
32. Jawa Barat	3217. BNNK Bandung Barat	47.6	74.0	48.9	72.4	60.7
32. Jawa Barat	3278. BNN Kota Tasikmalaya	54.9	77.2	70.2	65.7	67.0

32. Jawa Barat	3211. BNNK Sumedang	69.3	78.9	81.0	72.0	75.3
32. Jawa Barat	3208. BNNK Kuningan	52.3	73.8	70.2	72.6	67.2
33. Jawa Tengah	3301. BNNK Cilacap	65.5	77.3	60.2	63.0	66.5
33. Jawa Tengah	3324. BNNK Kendal	60.4	62.5	53.8	66.9	60.9
33. Jawa Tengah	3325. BNNK Batang	47.5	78.8	75.5	73.7	68.9
33. Jawa Tengah	3303. BNNK Purbalingga	64.3	52.8	68.4	71.9	64.3
33. Jawa Tengah	3323. BNNK Temanggung	53.5	64.6	72.7	68.2	64.8
33. Jawa Tengah	3302. BNNK Banyumas	60.3	73.5	75.0	65.4	68.5
33. Jawa Tengah	3308. BNNK Magelang	60.2	74.6	71.9	67.2	68.5
33. Jawa Tengah	3372. BNN Kota Surakarta	60.0	77.8	82.5	73.6	73.5
33. Jawa Tengah	3328. BNN Kota Tegal	44.8	78.9	84.3	77.0	71.3
34. DIY	3471. BNN Kota Yogyakarta	62.4	56.9	63.2	75.3	64.4
34. DIY	3404. BNNK Sleman	66.8	71.3	72.8	85.4	74.1
34. DIY	3402. BNNK Bantul	64.7	64.8	69.1	79.2	69.4
35. Jawa Timur	3579. BNN Kota Batu	57.3	68.5	53.2	76.0	63.7

35. Jawa Timur	3591. BNN Kota Malang	51.1	67.6	43.2	70.6	58.1
35. Jawa Timur	3578. BNN Kota Surabaya	69.5	63.7	59.8	76.1	67.3
35. Jawa Timur	3571. BNN Kota Kediri	75.2	76.3	68.9	74.5	73.7
35. Jawa Timur	3518. BNNK Nganjuk	72.4	73.7	67.6	64.5	69.5
35. Jawa Timur	3504. BNNK Tulungagung	61.4	67.8	72.0	70.9	68.0
35. Jawa Timur	3507. BNNK Malang	54.7	75.8	61.1	63.3	63.8
35. Jawa Timur	3525. BNNK Gresik	61.9	64.1	60.9	65.1	63.0
35. Jawa Timur	3503. BNNK Trenggalek	73.4	74.9	71.5	57.5	69.3
35. Jawa Timur	3508. BNNK Lumajang	39.6	78.6	79.3	71.5	67.2
35. Jawa Timur	3505. BNNK Blitar	55.2	72.1	39.8	72.2	59.8
35. Jawa Timur	3506. BNNK Kediri	72.2	61.3	37.9	61.4	58.2
35. Jawa Timur	3515. BNNK Sidoarjo	62.9	71.3	59.5	67.6	65.3
35. Jawa Timur	3529. BNNK Sumenep	63.9	69.2	73.7	78.7	71.4
35. Jawa Timur	3516. BNN Kota Mojokerto	69.9	61.1	59.9	75.2	66.5
35. Jawa Timur	3514. BNNK Pasuruan	70.2	51.3	63.1	62.1	61.7

35. Jawa Timur	3523. BNNK Tuban	68.4	64.7	65.1	72.1	67.8
36. Banten	3674. BNN Kota Tangerang Selatan	48.8	66.4	56.5	73.9	61.4
36. Banten	3672. BNN Kota Cilegon	61.1	69.9	66.5	74.3	67.9
36. Banten	3671. BNN Kota Tangerang	51.6	68.6	59.2	77.3	64.2
51. Bali	5171. BNN Kota Denpasar	45.6	59.3	60.2	65.6	57.7
51. Bali	5103. BNNK Badung	70.6	73.5	64.9	76.3	71.3
51. Bali	5104. BNNK Gianyar	82.5	64.4	46.1	55.9	62.2
51. Bali	5105. BNNK Klungkung	51.7	56.0	51.6	72.6	58.0
51. Bali	5108. BNNK Buleleng	61.2	68.1	39.0	73.1	60.3
51. Bali	5107. BNNK Karangasem	59.8	73.9	68.2	72.3	68.6
52. NTB	5271. BNN Kota Mataram	47.4	72.1	64.4	80.9	66.2
52. NTB	5207. BNNK Sumbawa Barat	41.0	79.5	73.5	72.4	66.6
52. NTB	5272. BNNK Bima	31.5	85.8	71.4	70.3	64.8
52. NTB	5204. BNNK Sumbawa	33.3	68.3	56.5	69.8	57.0
53. NTT	5303. BNN Kota Kupang	48.9	56.9	40.8	69.1	53.9

53. NTT	5314. BNNK Rote Ndao	37.3	71.3	84.5	66.9	65.0
53. NTT	5306. BNNK Belu	30.4	68.3	73.8	72.6	61.3
61. Kalimantan Barat	6172. BNN Kota Singkawang	47.2	68.7	49.3	60.6	56.5
61. Kalimantan Barat	6171. BNN Kota Pontianak	37.8	76.4	75.8	71.4	65.3
61. Kalimantan Barat	6105. BNNK Sanggau	32.0	72.2	10.0	64.0	44.5
61. Kalimantan Barat	6104. BNNK Mempawah	30.6	68.1	57.9	74.7	57.8
61. Kalimantan Barat	6102. BNNK Bengkayang	35.7	73.3	55.5	78.5	60.8
61. Kalimantan Barat	6107. BNNK Sintang	30.5	68.7	62.8	72.7	58.7
61. Kalimantan Barat	6112. BNNK Kubu Raya	42.0	71.5	58.8	79.3	62.9
62. Kalimantan Tengah	6271. BNN Kota Palangkaraya	68.7	65.7	64.0	74.6	67.7
62. Kalimantan Tengah	6201. BNNK Kotawaringin Barat	38.1	64.3	72.5	72.8	61.9
63. Kalimantan Selatan	6372. BNN Kota Banjarmasin	47.6	72.0	54.8	67.8	60.5
63. Kalimantan Selatan	6372. BNN Kota Banjar Baru	72.6	81.1	92.9	77.8	81.1
63. Kalimantan Selatan	6311. BNNK Balangan	59.3	79.2	76.5	77.3	73.1
63. Kalimantan Selatan	6306. BNNK Hulu Sungai Selatan	58.2	72.0	79.4	75.1	71.2

63. Kalimantan Selatan	6301. BNNK Tanah Laut	59.9	76.9	65.5	70.4	68.2
63. Kalimantan Selatan	6309. BNNK Tabalong	56.2	64.4	43.4	68.3	58.1
63. Kalimantan Selatan	6304. BNNK Barito Kuala	48.4	77.0	72.8	69.7	67.0
63. Kalimantan Selatan	6308. BNNK Hulu Sungai Utara	51.7	74.1	64.8	72.4	65.7
64. Kalimantan Timur'	6472. BNN Kota Samarinda	77.4	73.9	39.2	69.1	69.1
64. Kalimantan Timur'	6471. BNN Kota Balikpapan	58.2	79.0	83.9	69.3	72.6
64. Kalimantan Timur'	6474. BNN Kota Bontang	69.3	78.3	56.7	70.6	68.7
65. Kalimantan Utara	6571. BNN Kota Tarakan	67.7	77.3	75.6	79.8	75.1
65. Kalimantan Utara	6504. BNNK Nunukan	49.6	66.1	64.0	78.8	64.6
71. Sulawesi Utara	7171. BNN Kota Manado	55.6	39.3	42.6	73.4	52.7
71. Sulawesi Utara	7172. BNN Kota Bitung	67.5	61.3	53.3	68.8	62.7
71. Sulawesi Utara	7101. BNNK Bolaang Mongondow	53.1	62.4	10.0	63.2	48.3
71. Sulawesi Utara	7103. BNNK Kepulauan Sangihe	50.3	69.5	62.0	68.9	62.7
72. Sulawesi Tengah	7271. BNN Kota Palu	43.9	76.0	58.9		59.6
72. Sulawesi Tengah	7203. BNNK Morowali	64.1	79.9	72.8	19.6	59.1

72. Sulawesi Tengah	7205. BNNK Donggala	52.1	75.0	79.2	62.5	67.2
72. Sulawesi Tengah	7204. BNNK Poso	52.0	77.4	63.6	66.3	62.3
72. Sulawesi Tengah	7209. BNNK Tojo Una-Una	64.7	74.3	57.4	69.6	66.5
72. Sulawesi Tengah	7201. BNNK Banggai Kepulauan	58.6	63.4	57.2	54.3	58.4
73. Sulawesi Selatan	7373. BNN Kota Palopo	67.3	75.2	66.3	74.5	70.8
73. Sulawesi Selatan	7318. BNNK Tana Toraja	71.5	63.9	62.0	80.3	68.3
73. Sulawesi Selatan	7311. BNNK Bone	46.3	78.1	69.7	72.4	62.6
74. Sulawesi Tenggara	7471. BNN Kota Kendari	63.0	78.3	64.0	80.7	71.5
74. Sulawesi Tenggara	7404. BNNK Kolaka	49.1	66.4	64.3	71.1	62.7
74. Sulawesi Tenggara	7402. BNNK Muna	52.0	69.3	74.4	78.2	68.5
74. Sulawesi Tenggara	7472. BNN Kota Bau Bau	61.4	65.8	67.1	74.7	66.1
75. Gorontalo	7571. BNN Kota Gorontalo		64.8	63.2	62.9	63.6
75. Gorontalo	7504. BNNK Bone Bolango	33.4	68.9	73.6	81.0	64.2
75. Gorontalo	7501. BNNK Boalemo	43.5	51.1	67.8	67.0	57.4
75. Gorontalo	7502. BNNK Gorontalo	42.5	67.4	72.3	69.5	62.9

75. Gorontalo	7505. BNNK Gorontalo Utara	36.0	43.8	58.4	66.3	51.1
76. Sulawesi Barat	7602. BNNK Polewali Mandar	49.4	80.5	83.3	70.9	71.0
81. Maluku	8172. BNN Kota Tual	45.4	61.4	67.1	68.3	60.5
81. Maluku	8109. BNNK Buru Selatan	37.0	72.8	56.6	67.8	58.5
82. Maluku Utara	8272. BNN Kota Tidore Kepulauan	33.1	65.5	41.2	58.6	49.6
82. Maluku Utara	8205. BNNK Halmahera Utara		72.5	66.1	58.2	65.6
82. Maluku Utara	8207. BNNK Pulau Morotai	48.1	72.4	61.1	70.9	63.1
92. Papua	9203. BNNK Jaya Pura	56.2	50.6	60.2	62.9	57.5
92. Papua	9601. BNNK Mimika	44.3	76.8	52.0	69.2	60.6
Kab/Kota keseluruhan		53.1	70.3	63.7	69.1	64.0